

PERBANAS Review of Indonesia's Mid-Year Economy (PRIME) 2025

**Navigating Economic Headwinds:
Responding to Weakening Consumption**



KATA PENGANTAR

PERBANAS dengan bangga mempersembahkan PERBANAS Review of Indonesia's Mid-Year Economy (PRIME) 2025, sebuah kajian mendalam yang tidak hanya menilai dinamika perekonomian nasional sepanjang semester pertama 2025, tetapi juga memetakan skenario dan risiko utama yang akan mempengaruhi arah ekonomi Indonesia hingga akhir tahun. Kajian ini hadir sebagai kontribusi kami dalam memperkaya wawasan para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, industri, akademisi, hingga mitra internasional terhadap kondisi makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan peran perbankan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

Tahun 2025 diwarnai oleh rangkaian tantangan global dan domestik yang saling berkelindan: penurunan signifikan inflasi, pergeseran siklus suku bunga global, dan transisi struktur ekonomi nasional. *PRIME 2025* secara khusus menelaah dinamika ini melalui lima dimensi utama, yaitu: (1) perkembangan inflasi dan daya beli masyarakat, (2) efektivitas transmisi kebijakan moneter, (3) kinerja sektor-sektor strategis, (4) tren pertumbuhan kredit beserta Dana Pihak Ketiga, dan (5) stabilitas nilai tukar. Analisis disusun berdasarkan data terkini kuartal I dan II 2025, dipadukan dengan pendekatan kontekstual yang tajam, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang peluang dan risiko yang akan membentuk arah perekonomian Indonesia sepanjang sisa tahun 2025.

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah masuknya Indonesia ke era inflasi sangat rendah, yang memunculkan tantangan baru terkait pelemahan konsumsi dan tekanan terhadap dunia usaha. Pertumbuhan kredit tercatat lebih tinggi pada sektor-sektor seperti pertambangan (pertambangan & penggalian) dan energi (listrik, gas, dan air). Namun, sektor lain seperti industri pengolahan dan perdagangan mencatat laju pertumbuhan yang lebih moderat. Perbankan dihadapkan pada tantangan untuk menavigasi keseimbangan antara dorongan ekspansi kredit dan manajemen risiko, sejalan dengan dukungan arah kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

PRIME 2025 diharapkan menjadi rujukan bagi regulator, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan ekonomi. Kajian ini juga mendorong dan memperkuat dialog strategis agar perbankan berperan sebagai mitra utama dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penulis dan kontributor atas dedikasi, serta kerja kerasnya dalam menyusun kajian ini. Semoga *PRIME 2025* menjadi sumbangsih nyata yang menajamkan arah kebijakan ekonomi nasional dan memperkuat peran sektor perbankan Indonesia

Hery Gunardi

Ketua Umum PERBANAS

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Anika Faisal dan Aviliani

KETUA TIM PENULIS

Dzulfian Syafrian

ANGGOTA TIM PENULIS

Dendy Indramawan dan Chairini Nugraharti

KONTRIBUTOR

Anton Hendranata, Andry Asmoro, David E. Sumual, Banjaran Surya Indrastomo, Josua Pardede, Enrico Tanuwidjaja, Myrdal Gunarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
1. EKONOMI GLOBAL	7
1.1 Inflasi dan Suku Bunga Acuan: Tren yang Menurun	8
1.2 Tantangan Ekonomi Global 2025	13
1.3 Ekonomi Amerika Serikat 2025: Pemulihan dan Tantangan Utang	13
1.4 Ekonomi Tiongkok 2025: Pemulihan Mulai Melambat pada Paruh Pertama 2025	15
1.5 Ekonomi Jepang 2025: Pemulihan Melambat di Tengah Tantangan Inflasi	17
1.6 Ekonomi Uni Eropa 2025: Pulih Meski Manufaktur Kontraktif	20
2. EKONOMI DOMESTIK	23
2.1 Kinerja Ekonomi Regional	27
2.2 Inflasi	28
2.3 Neraca Pembayaran	31
2.4 Pelemahan Konsumsi Rumah Tangga	36
3. KINERJA PERBANKAN	39
3.1 Kredit Perbankan	39
3.2 Perkembangan Suku Bunga	46
4. OUTLOOK 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Inflasi di Berbagai Negara.....	9
Gambar 1.2 Harga Komoditas Internasional.....	10
Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi AS Triwulanan (% ,yoy)	14
Gambar 1.4 Inflasi AS 2019 - 2025 (%)	14
Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran AS 2019 - 2025 (%)	14
Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Jepang Triwulan (% ,yoy).....	17
Gambar 1.7 Komponen PDB Jepang	18
Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Jepang (%)	19
Gambar 1.9 Inflasi Jepang (%)	19
Gambar 1.10 Pertumbuhan Upah Riil (%)	19
Gambar 1.11 Pertumbuhan Ekonomi EU (%) (yoy)	21
Gambar 1.12 Inflasi EU (%) (yoy)	21
Gambar 1.13 Tingkat Pengangguran EU (%) (yoy)	21
Gambar 1.14 Pertumbuhan Production Index (%) (yoy) (2021 = 100)	21
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan	23
Gambar 2.2 PDRB Provinsi Q1-2025	27
Gambar 2.3 Proporsi PDRB (% , GDP)	28
Gambar 2.4 Inflasi Indonesia (% , yoy)	29
Gambar 2.5 Harga Pangan	30
Gambar 2.6 Neraca Perdagangan (Miliar USD)	31
Gambar 2.7 Negara Tujuan dan Asal.....	32
Gambar 2.8 Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah	34
Gambar 2.9 Nilai Tukar USD dan RMB	35
Gambar 2.10 Pertumbuhan Penjualan Ritel & Consumer Confidence Index	36
Gambar 3.1 Pertumbuhan Kredit dan DPK (%)	39
Gambar 3.2 Pertumbuhan Kredit Jenis (% , yoy)	40
Gambar 3.3 NPL Jenis (%)	41
Gambar 3.4 Porsi PDB serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)	45
Gambar 3.5 Porsi Tenaga Kerja Serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)	46
Gambar 3.6 Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Indonesia	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025-2026.....	7
Tabel 1.2 Suku Bunga Acuan di Berbagai Negara.....	11
Tabel 1.3 Purchasing Manufacturing Index (PMI).....	12
Tabel 1.4 Indikator Perekonomian Tiongkok.....	16
Tabel 2.1 Komposisi PDB Indonesia.....	24
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor.....	25
Tabel 3.1 Rata-Rata Saldo Per Rekening di Indonesia (Rp Juta)	42
Tabel 3.2 Pertumbuhan Kredit Sektoral (% ,yoy).....	43
Tabel 4.1 Proyeksi Indikator Ekonomi 2025.....	50
Tabel 4.2 Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025.....	51

EKONOMI GLOBAL

1. EKONOMI GLOBAL

Ekonomi global pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh moderat, namun masih diwarnai oleh stagnasi dan tekanan struktural di berbagai kawasan. IMF memperkirakan pertumbuhan global sebesar 2,8% pada 2025, sementara Bank Dunia lebih pesimistis dengan proyeksi hanya 2,7% pada 2025 (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025-2026

**Proyeksi
Pertumbuhan
Ekonomi
2025-2026**



Wilayah	IMF				World Bank			
	2024	2025F	2025F*	2026F	2024	2025F	2025F*	2026F
Global	3.3	3.2	2.8 ↓	3.0	2.8	2.7	2.3 ↓	2.4
Negara Maju	1.8	1.8	1.4 ↓	2.0	1.7	1.7	1.2 ↓	1.2
Negara Berkembang	4.3	4.2	3.7 ↓	4.0	4.2	4.1	3.8 ↓	3.8
Amerika Serikat	2.8	2.2	1.8 ↓	2.0	2.8	2.5	1.4 ↓	1.6
Uni Eropa	1.1	1.2	0.8 ↓	2.0	0.9	1.0	0.7 ↓	0.8
Tiongkok	5.0	4.5	4.0 ↓	4.0	5.0	4.5	4.5 —	4.0
India	6.5	6.5	6.2 ↓	6.0	6.5	6.7	6.3 ↓	6.5
Indonesia	5.0	5.1	4.7 ↓	5.0	5.0	5.1	4.7 ↓	4.8

*) Revisi Kedua

Sumber: IMF dan World Bank (2025)

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi periode yang penuh tantangan meskipun tekanan inflasi global telah menunjukkan tren pelandaian dan suku bunga acuan di sejumlah negara diperkirakan mulai menurun. Meski kondisi moneter tampak lebih akomodatif, tantangan struktural dan geopolitik diprediksi akan mendominasi dinamika ekonomi global.

Salah satu tantangan utama adalah kenaikan tarif Amerika yang berdampak di banyak negara termasuk Indonesia. Konflik ini tidak hanya memengaruhi stabilitas rantai pasok global, tetapi juga mendorong semakin ketatnya peraturan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan yang lebih restriktif diperkirakan akan menciptakan hambatan baru bagi perdagangan lintas negara, khususnya bagi negara-negara berkembang yang sangat terdampak ketika terjadi gejolak perdagangan dan nilai tukar.

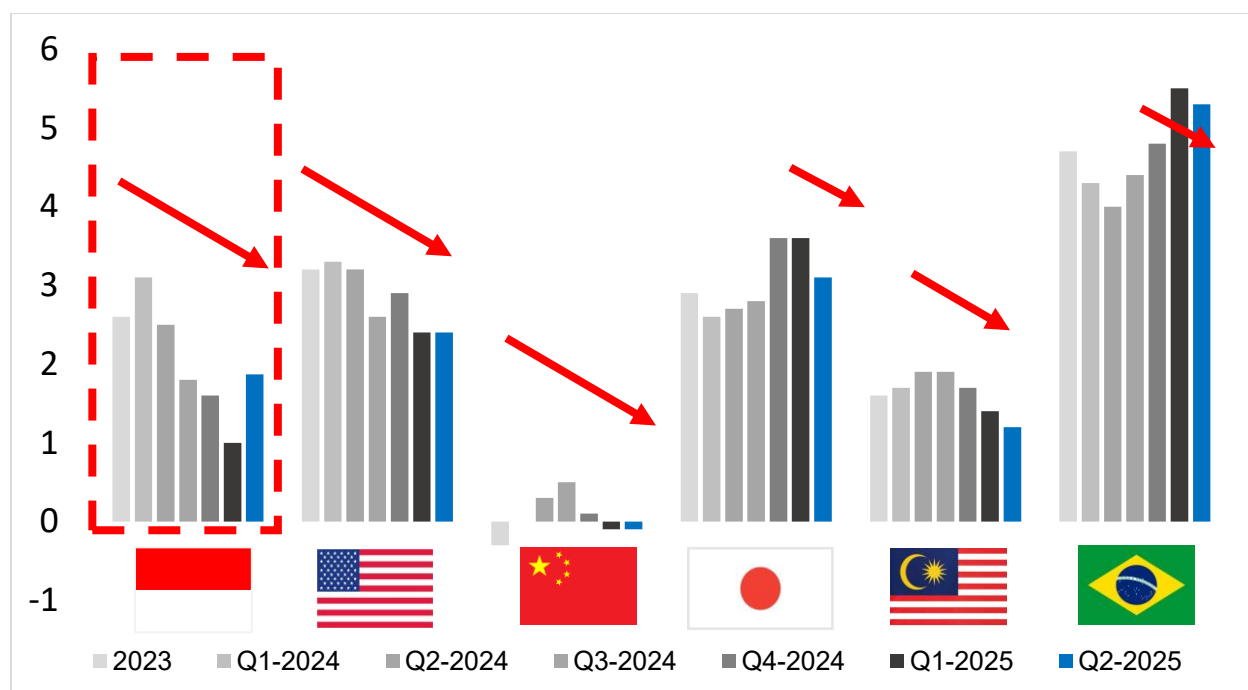
Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah menambah lapisan ketidakpastian terhadap ekonomi global. Di sisi lain, transisi pemerintahan yang akan berlangsung di beberapa negara besar turut memberikan dampak terhadap kinerja kebijakan fiskal. Proses pergantian kepemimpinan sering kali disertai dengan perubahan prioritas kebijakan yang dapat memengaruhi efektivitas stimulus fiskal dan daya dorongnya terhadap perekonomian. Respon kebijakan yang tepat, baik secara domestik maupun melalui koordinasi internasional, menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks di tahun 2025.

1.1 Inflasi dan Suku Bunga Acuan: Tren yang Menurun

Inflasi di berbagai negara menunjukkan tren penurunan hingga kuartal II-2025, mencerminkan keberhasilan berbagai negara dalam mengendalikan tekanan harga, terutama pasca gejolak komoditas dan gangguan rantai pasok global. Di Indonesia, inflasi terus melandai dibawah 3% pada awal 2023 menjadi di bawah 2% pada Q2-2025. Penurunan ini didorong oleh stabilisasi harga pangan dan energi, serta kebijakan moneter yang tetap berhati-hati.

Tren serupa juga terlihat di Amerika Serikat, di mana inflasi mendekati target Federal Reserve. Sementara di Tiongkok, tekanan deflasi masih membayangi akibat lemahnya permintaan domestik dan transisi struktural ekonomi. Jepang tetap menghadapi tantangan inflasi yang cenderung tinggi dan stabil, di atas 3%, di tengah pemulihan permintaan domestik. Di sisi lain, inflasi Malaysia dan Brasil menunjukkan penurunan lebih terbatas, dengan Brasil tetap mencatatkan inflasi tertinggi di antara negara-negara dalam observasi.

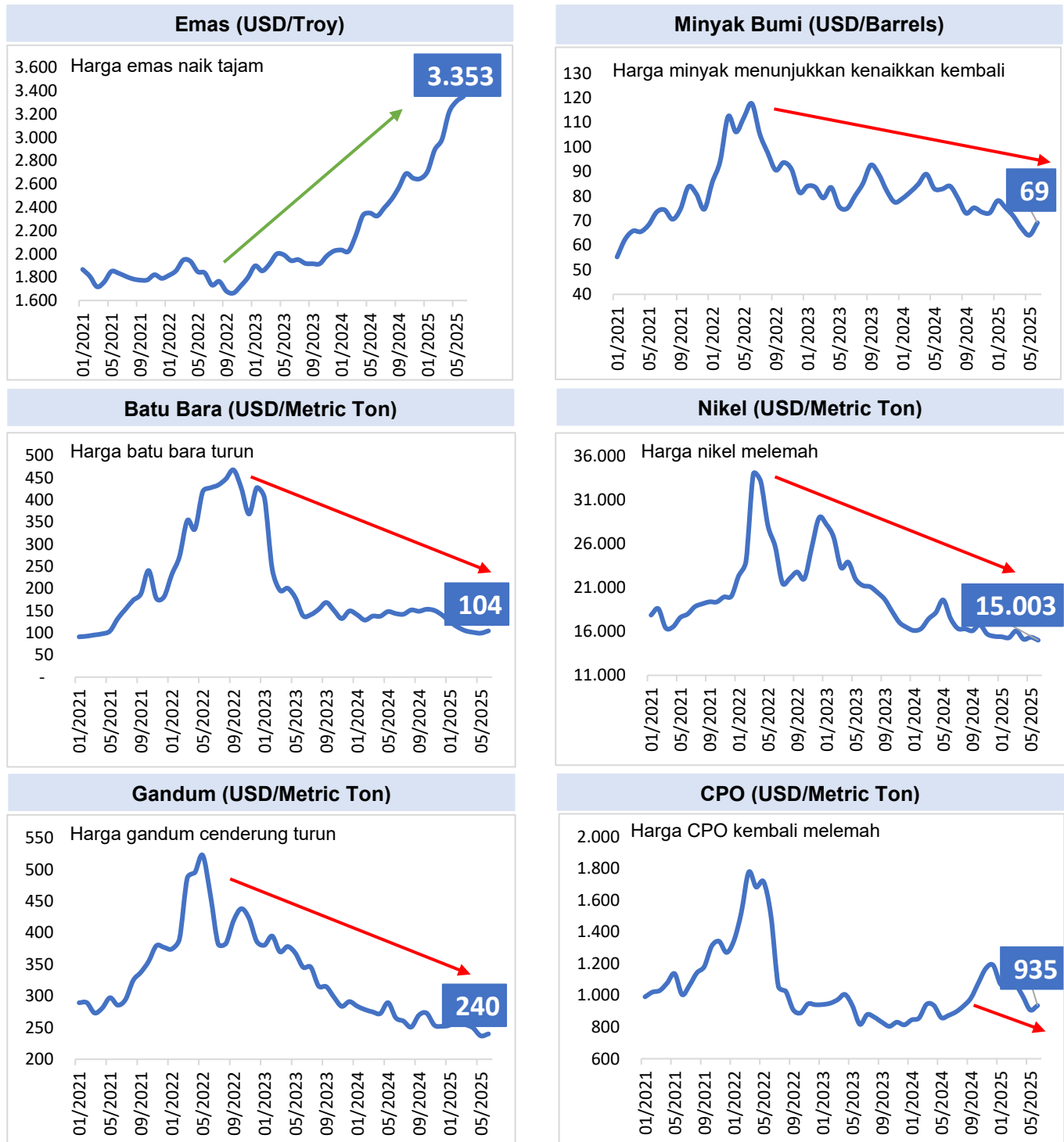
Gambar 1.1 Inflasi di Berbagai Negara



Sumber: CEIC (2025)

Meskipun inflasi global mereda, harga beberapa komoditas strategis seperti emas masih mengalami apresiasi akibat tingginya ketidakpastian geopolitik dan aliran dana (capital flow) ke aset lindung nilai (safe haven). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan pasokan energi yang melimpah telah menekan harga sejumlah komoditas strategis seperti minyak bumi, batu bara, nikel, gandum, dan CPO—ke level terendah sepanjang 2020 (Gambar 1.2). Meskipun tren ini dapat mengurangi risiko inflasi jangka pendek, namun memperlemah prospek pertumbuhan di mayoritas negara berkembang, yang bergantung pada ekspor komoditas.

Gambar 1.2 Harga Komoditas Internasional



Sumber: CEIC (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan kebijakan pelonggaran moneter terjadi di beberapa negara. Uni Eropa, misalnya, terus menurunkan suku bunga acuannya dari 3,15% pada awal 2024 menjadi 2,15% pada Juni 2025 sebagai respons terhadap meredanya tekanan inflasi, khususnya dari sisi energi. Sementara itu, Jepang mulai keluar dari kebijakan suku bunga ultra-rendah dengan menaikkan suku bunga menjadi 0,50% sejak Maret 2024, menunjukkan perubahan arah kebijakan yang hati-hati. Sebaliknya, Malaysia dan Tiongkok cenderung mempertahankan tingkat suku bunga stabil di tengah inflasi yang relatif terkendali dan fokus menjaga momentum pemulihan domestik. Di sisi lain, Brazil justru mulai menaikkan suku bunganya kembali ke 15,00% pada Juni 2025, seiring dengan dinamika inflasi dan tekanan nilai tukar di kawasan Amerika Latin.

Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter secara bertahap dengan menurunkan suku bunga acuan dari 5,50% pada awal 2025 menjadi 5,25% pada Juli 2025. Langkah ini ditempuh di tengah terkendalinya inflasi domestik dan untuk mendorong daya beli masyarakat. Meski demikian, pelonggaran dilakukan secara hati-hati, mengingat ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang masih cukup tinggi. BI tetap menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas makroekonomi, terutama dalam konteks capital flow yang fluktuatif akibat arah kebijakan suku bunga global.

Tabel 1.2 Suku Bunga Acuan di Berbagai Negara

Negara	Rate	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Jan	2025 Feb	2025 Mar	2025 Apr	2025 Mei	2025 Jun	2025 Juli
 Indonesia	Reverse Repo	5.00	3.75	3.50	5.50	6.00	6.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.50	5.50	↓ 5.25
 Amerika Serikat	FFR	1.75	0.25	0.25	4.50	5.50	↓ 4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
 Uni Eropa	Main Refinancing Rate	0.00	0.00	0.00	2.50	4.50	3.15	2.90	2.90	2.65	2.40	2.40	↓ 2.15	2.15
 Jepang	Short-Term Policy Interest Rate	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.25	↑ 0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
 Brazil	Selic Interest Rate	4.50	2.00	9.25	13.75	11.75	12.25	13.25	13.25	14.25	14.25	14.75	↑ 15.00	15.00
 Malaysia	Policy Rate	3.00	1.75	1.75	2.75	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	↓ 2.75
 Australia	Cash Rate	0.75	0.10	0.10	3.10	4.35	4.35	4.35	4.10	4.10	4.10	↓ 3.85	3.85	3.85
 Tiongkok	Key Policy Rate	4.15	3.85	3.85	3.65	3.45	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	↓ 3.00	3.00	3.00

Sumber: Bank Indonesia (2025)

Kinerja sektor manufaktur global pada Semester I 2025 menunjukkan tekanan yang meningkat, tercermin dari melemahnya Purchasing Managers' Index (PMI) di sejumlah negara utama. PMI Inggris terus berada di zona kontraksi (<50) sejak awal 2024, dan kembali mengalami pelemahan signifikan sejak Januari 2025, dengan angka terendah tercatat pada Maret 2025 sebesar 44,6. Hal ini menunjukkan lemahnya permintaan domestik maupun ekspor, serta ketidakpastian di sektor industri.

PMI Tiongkok, meskipun sempat mencatat kontraksi pada awal tahun, mulai menunjukkan perbaikan pada Mei dan Juni 2025, dengan level kembali di atas 50. Sementara itu, Amerika Serikat mempertahankan PMI di zona ekspansif sepanjang semester I 2025, dengan tren yang relatif stabil. Kinerja manufaktur AS menjadi salah satu faktor penyangga stabilitas industri global, di tengah tekanan yang masih berlangsung di negara lain.

PMI Indonesia menunjukkan pelemahan paling dalam dalam tiga bulan terakhir. Setelah sempat pulih di awal tahun, PMI Indonesia turun dari 53,6 pada Februari menjadi 46,9 pada Juni 2025, menandakan masuknya sektor manufaktur dalam fase kontraksi. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan negara-negara pembanding dan mencerminkan tekanan pada permintaan domestik maupun kegiatan produksi.

Tabel 1.3 Purchasing Manufacturing Index (PMI)

Negara	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agt 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025
 Indonesia	54,2	52,9	52,1	50,7	49,3	48,9	49,2	49,2	49,6	51,2	51,9	53,6	52,4	46,7	47,4	46,9
 USA	51,9	50	51,3	51,6	49,6	47,9	47,3	48,5	49,7	51,5	51,2	52,7	50,7	50,2	52	52,9
 Tiongkok	51,1	51,4	51,7	51,8	49,8	50,4	49,3	50,3	51,5	50,1	49,1	50,2	50,5	49	49,5	50,4
 Inggris	50,3	49,1	51,2	50,9	52,1	52,5	51,5	49,9	48	53,3	48,3	44,6	46,4	45,4	46,4	47,7

Keterangan: Hijau (>50) = ekspansif, merah (<50) = kontraktif

Sumber: CEIC, (2025)

Tren pelemahan PMI di berbagai negara, menjadi sinyal peringatan dini terhadap risiko perlambatan global. Jika berlanjut, kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran rantai pasok global (global value chain), memperlambat arus perdagangan internasional, dan menekan kinerja ekspor negara berkembang. Dalam konteks ini, respons kebijakan yang adaptif dan koordinatif menjadi penting untuk menjaga stabilitas industri dan mendukung pemulihan permintaan sektor riil.

1.2 Tantangan Ekonomi Global 2025

Memasuki tahun 2025, perekonomian global dihadapkan pada serangkaian tantangan struktural dan siklikal yang memperbesar ketidakpastian. Tiga isu utama—eskalasi tensi geopolitik, transisi kebijakan pasca pemilihan umum di berbagai negara besar, dan pelambatan ekonomi Tiongkok—menciptakan tekanan yang kompleks terhadap stabilitas pasar global, aliran investasi, dan harga komoditas strategis. Ketiga faktor ini saling terkait dan membentuk gelombang guncangan yang menantang arah pemulihan ekonomi global.

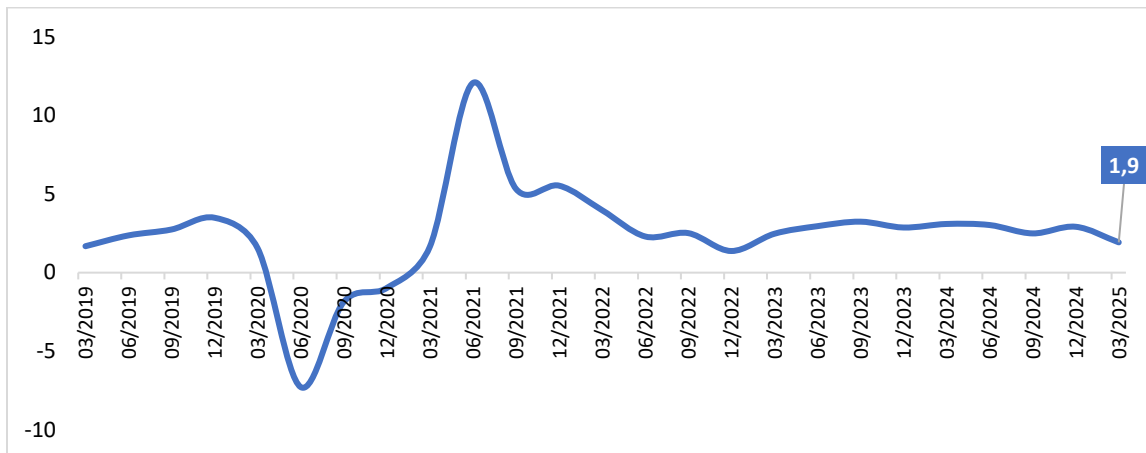
Tensi geopolitik memanas, terutama di Timur Tengah, dengan risiko blokade Selat Hormuz yang berdampak langsung pada pasokan dan harga energi dunia. Ketegangan antara Iran dan Israel, serta konflik Rusia–Ukraina yang belum mereda, menambah tekanan terhadap pasar energi. Kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden AS menimbulkan potensi perubahan kebijakan perdagangan global. Namun, keberhasilan Indonesia menjaga struktur tarif bilateral yang saling menguntungkan, di mana mayoritas ekspor ke AS bebas tarif, membuat risiko langsung terkendali. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap risiko tidak langsung seperti tekanan harga dan perlambatan permintaan global.

Transisi kebijakan pasca-pemilu juga menciptakan ketidakpastian tersendiri. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Indonesia, India, dan Uni Eropa sedang menyusun ulang arah kebijakan fiskal, iklim, dan perdagangan pasca pemilu 2024. Ketidakjelasan arah kebijakan baru ini membuat pasar keuangan global bersikap *wait-and-see*, menahan ekspansi investasi, dan menimbulkan volatilitas di pasar modal dan valas.

Sementara itu, pelambatan ekonomi Tiongkok menjadi risiko utama lainnya. Krisis sektor properti, lemahnya konsumsi domestik, dan ancaman deflasi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Efek domino dari kondisi ini mulai terasa pada penurunan permintaan terhadap komoditas seperti pertambangan dan energi, terganggunya rantai pasok global, serta berkurangnya momentum pertumbuhan di negara berkembang yang sangat bergantung pada permintaan dari Tiongkok.

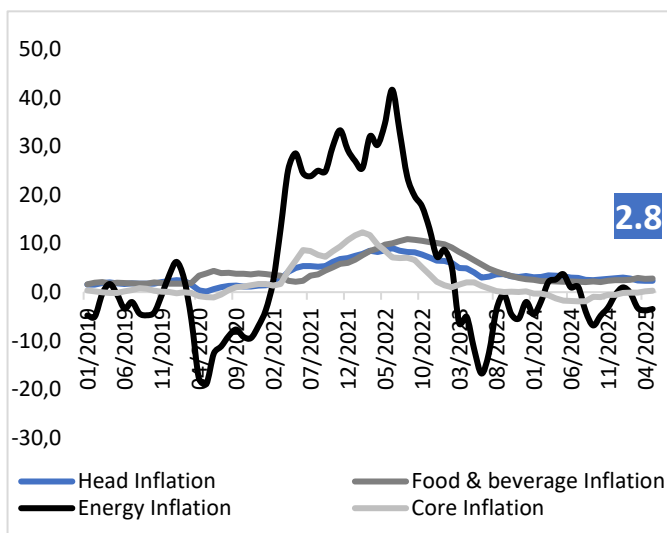
1.3 Ekonomi Amerika Serikat 2025: Pemulihan dan Tantangan Utang

Perekonomian Amerika Serikat terus mencatatkan pertumbuhan positif hingga kuartal I-2025, dengan laju pertumbuhan tercatat sebesar 1,9% year-on-year. Meskipun pertumbuhan ini masih menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan, angkanya mulai melandai dibandingkan periode puncak pasca-pandemi pada tahun 2021–2022. Setelah mengalami kontraksi tajam selama awal pandemi Covid-19, ekonomi AS sempat melonjak dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2021. Namun, sejak pertengahan 2022, tren pertumbuhan menunjukkan pola melandai, seiring dengan pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve dan memudarnya efek stimulus fiskal.

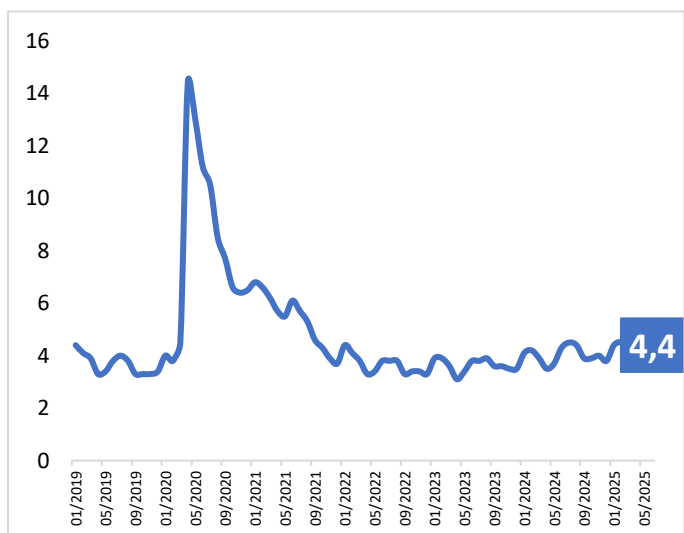
Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi AS Triwulanan (% ,yoy)

Sumber: CEIC (2025)

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat sepanjang paruh pertama 2025 terus mendapatkan dukungan dari stabilisasi inflasi dan tetap kuatnya pasar tenaga kerja. Tingkat inflasi AS tercatat sebesar 2,8% (yoy) pada bulan Juni 2025, mendekati target jangka panjang Federal Reserve di level 2%. Tren ini menegaskan keberhasilan pengendalian harga setelah periode tekanan inflasi tinggi pada 2022–2023. Penurunan inflasi didorong oleh deflasi pada komponen energi, meningkatnya produksi gas alam domestik, serta stabilnya harga pangan dan transportasi.

Gambar 1.4 Inflasi AS 2019 - 2025 (%)

Sumber: CEIC (2025)

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran AS 2019 - 2025 (%)

Sementara itu, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,4%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata historis pra-pandemi, namun tetap dalam kisaran yang dianggap sehat untuk mendukung ekspansi ekonomi. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja tetap kuat, khususnya di sektor jasa, kesehatan, dan manufaktur ringan. Kenaikan upah riil, terutama di kelompok pendapatan bawah, terus mendukung daya beli rumah tangga dan konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi AS.

Namun, stabilitas makroekonomi ini dihadapkan pada risiko fiskal yang meningkat. Utang pemerintah AS diperkirakan telah menembus angka USD 36 triliun pada pertengahan 2025, sekitar 122% dari PDB. Kenaikan utang disertai dengan beban bunga yang tinggi akibat suku bunga pinjaman yang masih berada di atas 4,5%. Ketidakpastian fiskal ini menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan, terutama menjelang negosiasi baru antara pemerintah dan Kongres terkait kenaikan batas utang.

Presiden terpilih Donald Trump diperkirakan akan mendorong reformasi kebijakan ekonomi domestik melalui pemangkasan pajak dan proteksionisme dagang. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan konsumsi dan investasi domestik, namun juga menimbulkan tantangan bagi stabilitas fiskal. Di sisi lain, rencana peningkatan tarif impor hingga 20% dapat meningkatkan harga barang konsumsi di dalam negeri, serta memicu ketegangan perdagangan global dengan mitra utama seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang melandai, inflasi yang mulai terkendali, dan meningkatnya tekanan fiskal membuat arah kebijakan moneter dan fiskal Amerika Serikat ke depan menjadi salah satu jangkar utama yang membentuk ekspektasi pasar global. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, respons terhadap dinamika ini akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas eksternal, aliran modal, dan kesinambungan perekonomian domestik.

1.4 Ekonomi Tiongkok 2025: Pemulihan Mulai Melambat pada Paruh Pertama 2025

Pemulihan ekonomi Tiongkok berlanjut pada awal 2025, ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB sebesar 5,4% (yoy) di kuartal I. Namun, laju pertumbuhan melambat pada kuartal II menjadi 5,2% (yoy). Perlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh tekanan pada sektor industri dan penurunan kinerja ekspor di tengah lemahnya permintaan global.

Meskipun demikian, permintaan domestik menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini tercermin dari peningkatan penjualan ritel sebesar 6,4% (yoy) pada kuartal II 2025, yang mengindikasikan adanya pemulihan konsumsi masyarakat. Dorongan ini tidak lepas dari berbagai program stimulus pemerintah, termasuk insentif untuk trade-in barang tahan lama guna mendorong belanja konsumen.

Pertumbuhan produksi industri masih solid di level 5,8% (yoy) pada kuartal II, meskipun lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya (7,7%). Penurunan ini mengindikasikan potensi moderasi pada sektor manufaktur, terutama karena tekanan dari sisi eksternal dan basis pembandingan yang tinggi.

Kinerja ekspor tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,8% (yoy), meskipun lebih rendah dari 12,4% pada kuartal I. Sementara itu, impor tetap dalam zona kontraksi sebesar -3,4% (yoy), menandakan bahwa konsumsi dan investasi domestik masih belum pulih secara penuh. Ketimpangan ini mencerminkan ketergantungan pada permintaan global yang tinggi, sementara permintaan domestik baru mulai bangkit.

Di sisi fiskal, penerimaan pemerintah mencatat kontraksi sebesar -0,3% (yoy), menandakan adanya tekanan terhadap kapasitas pembiayaan negara. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Tiongkok dalam menjaga kesinambungan stimulus fiskal, khususnya jika tekanan eksternal semakin meningkat dalam beberapa kuartal ke depan.

Walaupun demikian, belanja pemerintah masih tumbuh sebesar 4,1% (yoy), mencerminkan komitmen untuk mempertahankan momentum pemulihan. Alokasi anggaran difokuskan pada penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur, sebagai bagian dari strategi jangka menengah dalam menghadapi tekanan eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Tabel 1.4 Indikator Perekonomian Tiongkok

Indikator (yoy)	2020-23 Avg	2023	2024	2025-Q1	2025-Q2
GDP	4.8%	5.2%	5.0%	5.4%	5.2%
Industrial production	5.0%	4.6%	5.8%	7.7%	5.8%
Retail sales	4.1%	7.2%	3.5%	5.9%	6.4%
Fixed asset investment	4.4%	3.0%	3.2%	4.2%	3.7%
Exports	9.0%	-4.6%	7.1%	12.4%	4.8%
Imports	6.4%	-5.5%	2.3%	-4.3%	-3.4%
Income per capita	4.8%	6.1%	5.3%	4.9%	-
Fiscal revenue	4.6%	6.4%	1.3%	-1.1%	-0.3%
Fiscal expenditures	3.7%	5.4%	3.6%	4.2%	4.1%

Sumber: KPMG dan National Bureau of Statistics of Tiongkok (2025)

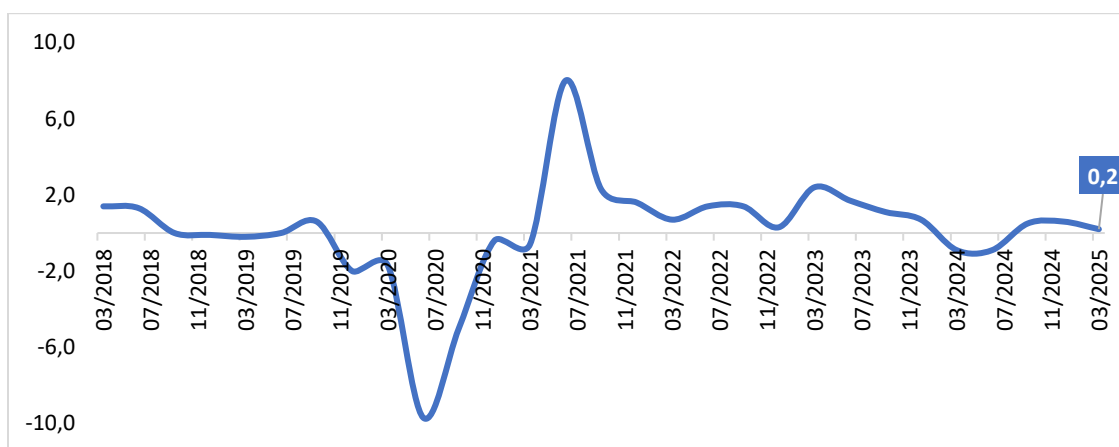
Ke depan, Pemerintah Tiongkok dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi domestik dan tekanan eksternal yang terus meningkat. Ketegangan geopolitik, khususnya dengan Amerika Serikat, diprediksi akan kembali memanas menyusul potensi terpilihnya kembali Donald Trump yang dikenal dengan pendekatan proteksionis dalam kebijakan perdagangannya. Kondisi ini berisiko menghambat kinerja ekspor Tiongkok sekaligus menekan aliran investasi asing langsung.

Di sisi lain, keberlanjutan pemulihan ekonomi Tiongkok memiliki dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada negeri tersebut sebagai mitra dagang utama. Performa sektor manufaktur dan daya beli domestik Tiongkok akan menentukan arah perdagangan global ke depan. Jika tren perlambatan ekonomi Tiongkok berlanjut, risiko efek rambatan (spillover) terhadap negara-negara mitra, termasuk Indonesia, akan semakin tinggi.

1.5 Ekonomi Jepang 2025: Pemulihan Melambat di Tengah Tantangan Inflasi

Perekonomian Jepang terus menghadapi perlambatan pada 2025. Pada kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,2% (yoy), jauh lebih rendah dibanding periode puncak pemulihan pasca-pandemi. Tren ini menegaskan bahwa momentum ekspansi yang sempat tercipta pada 2021–2022 kini mulai kehilangan tenaga, terutama akibat tekanan struktural dalam negeri dan pelemahan eksternal.

Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Jepang Triwulan (%yoy)



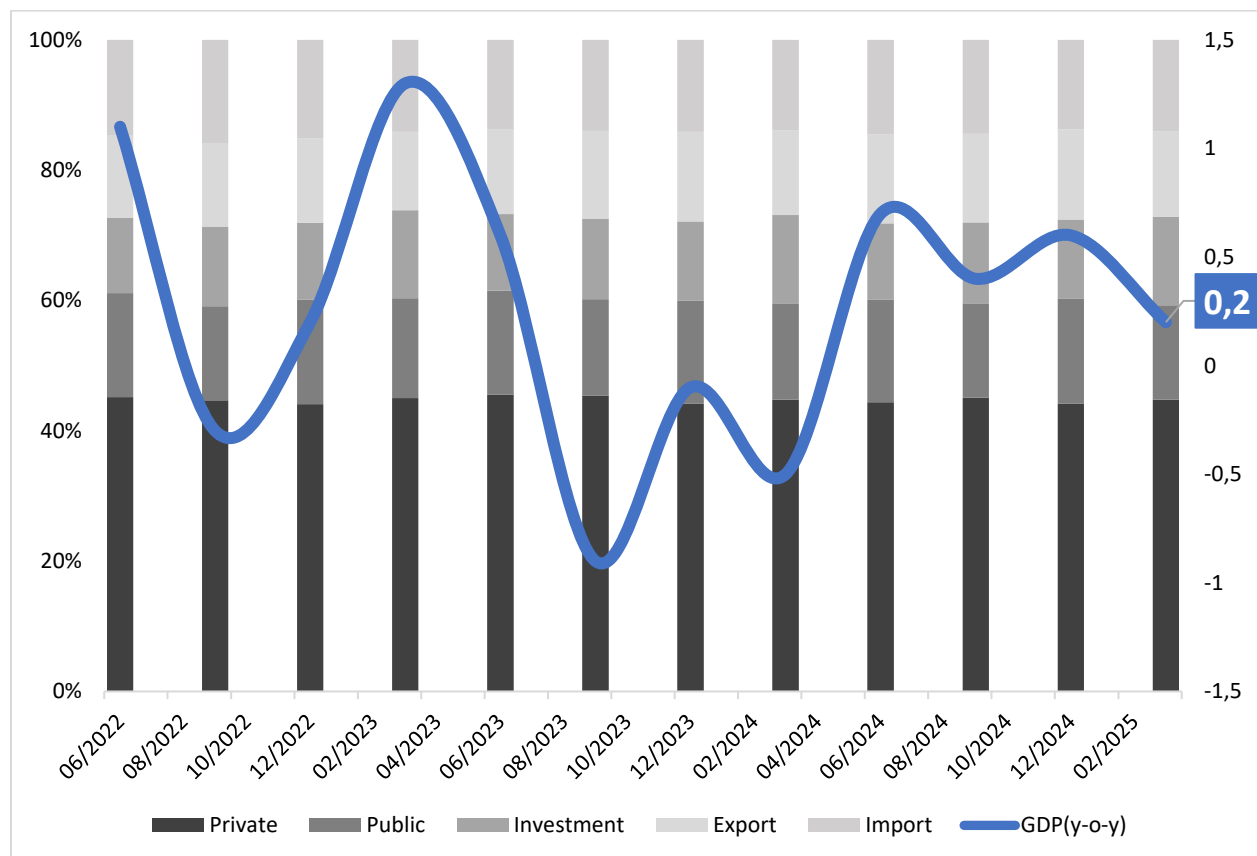
Sumber: CEIC (2025)

Kontribusi ekspor terhadap PDB mulai melemah akibat menurunnya permintaan global, terutama dari negara mitra utama seperti Tiongkok dan Eropa. Di saat yang sama, sektor industri domestik mengalami tekanan berat, terutama pada sektor otomotif dan elektronik.

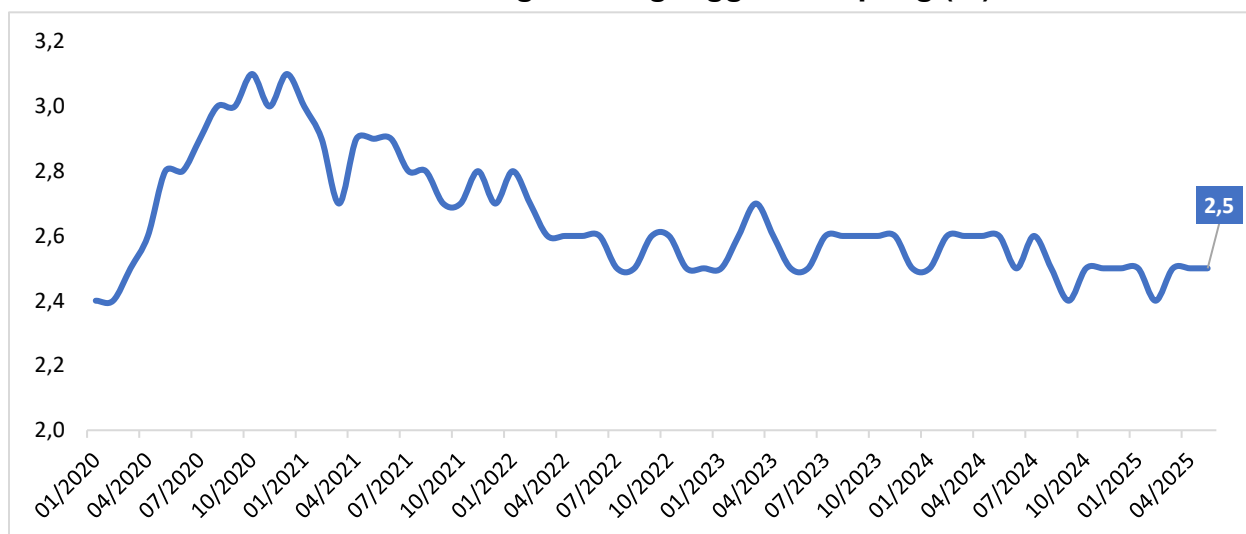
Di sisi konsumsi rumah tangga, inflasi yang persisten, khususnya pada kebutuhan pokok seperti air, listrik, dan gas, terus membebani daya beli masyarakat. Meski upah nominal mengalami peningkatan terbatas, upah riil tetap tumbuh negatif selama beberapa kuartal terakhir, menggerus konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang hampir 40% PDB Jepang. Pasar tenaga kerja Jepang tetap relatif stabil dengan tingkat pengangguran rendah, namun struktur demografi yang menua cepat membuat pertumbuhan angkatan kerja semakin stagnan. Di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global, risiko stagflasi menjadi perhatian utama, di mana pertumbuhan lemah terjadi bersamaan dengan tekanan harga yang belum sepenuhnya reda.

Secara keseluruhan, Jepang kini menghadapi tantangan jangka menengah untuk menjaga ketahanan konsumsi domestik dan mendorong produktivitas industri di tengah perubahan lanskap kompetisi global dan keterbatasan ruang fiskal. Strategi transformasi industri dan peningkatan daya saing ekspor menjadi sangat krusial dalam menopang prospek pemulihan ekonomi Jepang ke depan.

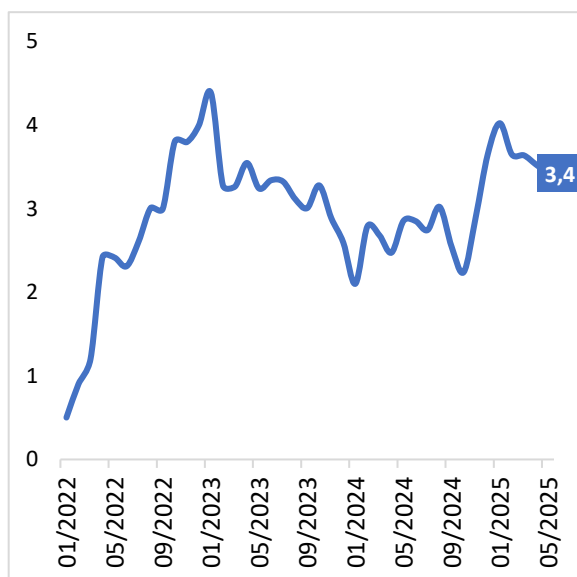
Gambar 1.7 Komponen PDB Jepang



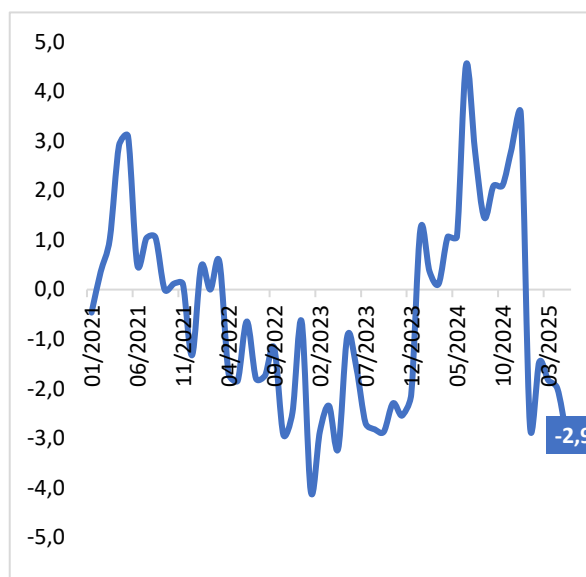
Sumber: CEIC (2025)

Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Jepang (%)

Sumber: CEIC (2025)

Gambar 1.9 Inflasi Jepang (%)

Sumber: CEIC (2025)

Gambar 1.10 Pertumbuhan Upah Riil (%)

Inflasi yang tinggi juga terkait dengan kenaikan harga energi global, yang berdampak langsung pada biaya hidup. Ketergantungan Jepang pada impor energi, terutama gas alam cair (LNG), memperburuk tekanan inflasi di tengah fluktuasi harga global. Selain itu, melemahnya yen pada tahun-tahun sebelumnya meningkatkan biaya impor, menambah tekanan pada daya beli masyarakat.

Ke depan, Jepang menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah Jepang perlu mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan percepatan pertumbuhan upah riil. Tekanan terhadap daya beli yang belum pulih sepenuhnya membuat prospek ekonomi Jepang pada 2025 masih menghadapi tantangan.

1.6 Ekonomi Uni Eropa 2025: Pulih Meski Manufaktur Kontraktif

Perekonomian Uni Eropa mengalami pertumbuhan terbatas hingga awal 2025. Pada kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,41% (yoy), menguat dibandingkan tahun sebelumnya namun masih tergolong rendah dalam konteks historis. Inflasi juga berhasil ditekan hingga mencapai 2,22%, turun signifikan dari puncaknya pada 2022 akibat konflik Rusia–Ukraina dan disrupsi rantai pasok. Kendati demikian, tekanan di pasar tenaga kerja mulai terlihat, di mana tingkat pengangguran kembali meningkat menjadi 6,23%, mencerminkan melemahnya momentum pemulihan ekonomi riil.

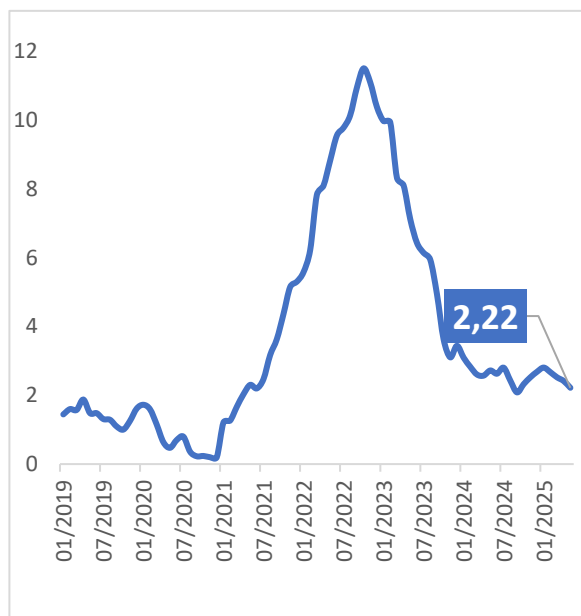
Sementara itu, sektor industri manufaktur masih berada dalam posisi lemah. Indeks produksi industri hanya tumbuh tipis dan masih berada di zona kontraktif, menandakan bahwa kapasitas produksi belum pulih secara optimal. Tantangan eksternal pun menambah beban: potensi kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk elektronik berisiko menekan daya saing ekspor Uni Eropa. Di sisi lain, meskipun harga energi telah menurun, harga gas alam masih lebih tinggi dibandingkan sebelum 2022 dan jauh di atas harga di AS, menimbulkan tekanan biaya produksi—terutama bagi sektor padat energi.

Selain faktor biaya, Uni Eropa juga menghadapi persaingan global yang semakin ketat, terutama dari Tiongkok. Dominasi Tiongkok dalam sektor kendaraan listrik (EV) semakin nyata, dengan penetrasi produk yang lebih murah dan inovatif. Produsen otomotif besar Eropa seperti Volkswagen mulai kehilangan pangsa pasar karena agresivitas ekspansi merek-merek otomotif Tiongkok di pasar global, termasuk kawasan Eropa sendiri. Tekanan biaya, risiko kebijakan perdagangan, dan kompetisi teknologi menjadi kombinasi tantangan utama bagi daya saing manufaktur Uni Eropa dalam beberapa waktu ke depan.

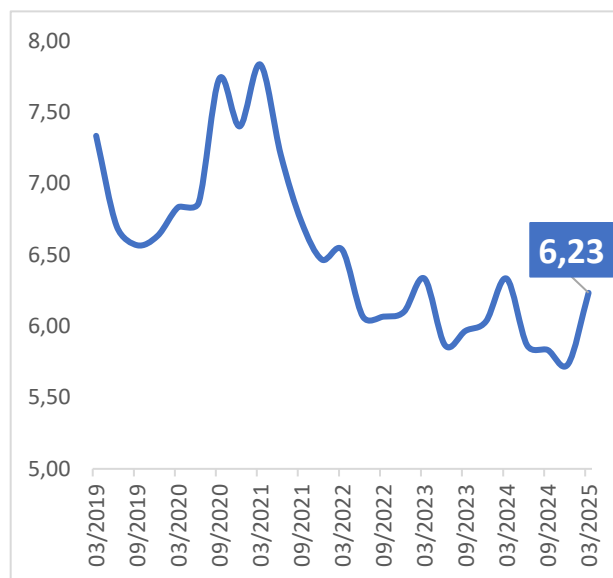
**Gambar 1.11 Pertumbuhan Ekonomi EU
(%) (yoy)**



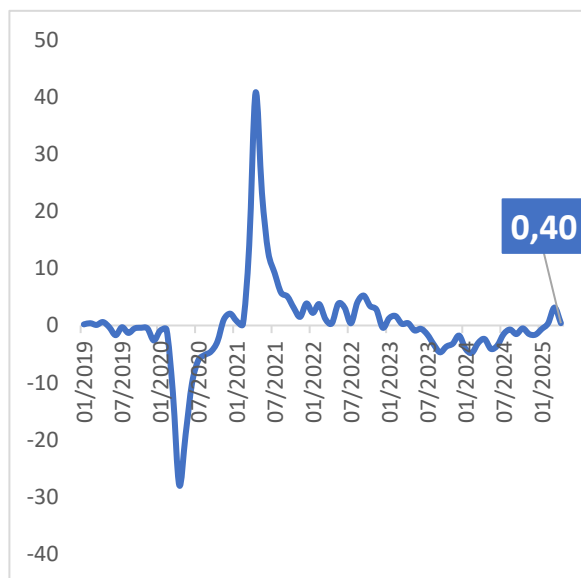
**Gambar 1.12 Inflasi EU
(%) (yoy)**



**Gambar 1.13 Tingkat Pengangguran EU
(%) (yoy)**



**Gambar 1.14 Pertumbuhan Production Index
(%) (yoy) (2021 = 100)**



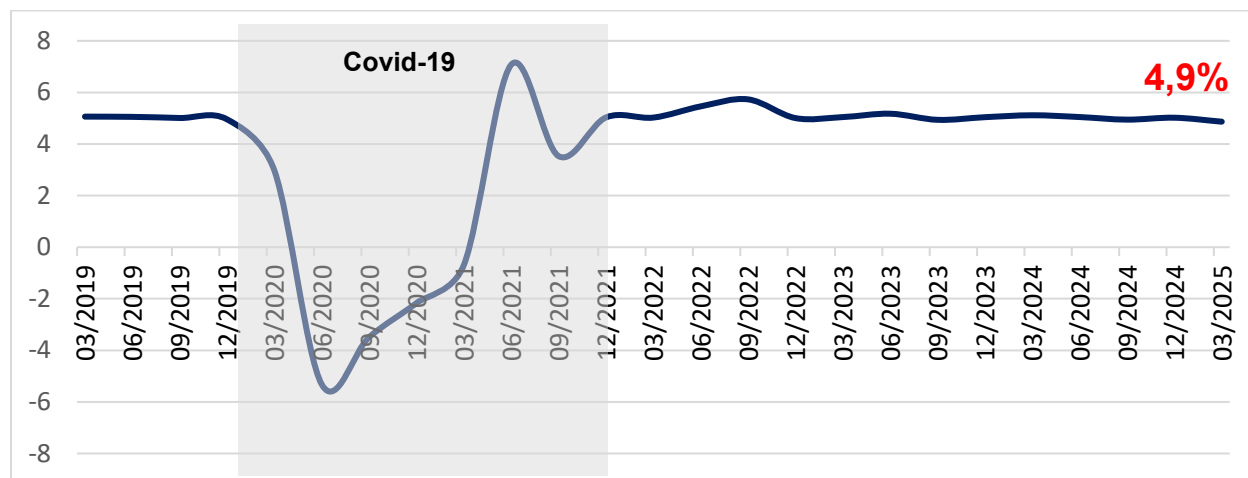
Sumber: CEIC (2025)

EKONOMI DOMESTIK

2. EKONOMI DOMESTIK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tercatat sebesar **4,82% (yoy)**, cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih dalam kisaran moderat dan berada di atas angka pra-pandemi, laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-Covid mulai kehilangan momentum di tengah tekanan domestik dan global.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (% , yoy)



Sumber: BPS (2025)

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB Indonesia masih tumbuh positif, namun tidak sekuat periode sebelumnya. Hal ini disebabkan tekanan pada pelemahan daya beli di kelas menengah dan bawah. Ini tentu berdampak pada perlambatan permintaan agregat domestik.

Sementara itu, investasi menunjukkan peningkatan terbatas, dengan realisasi yang lebih banyak terkonsentrasi di sektor hilirisasi mineral dan energi terbarukan. Namun, ketidakpastian global dan tingginya suku bunga global masih menjadi faktor penahan bagi percepatan investasi swasta secara luas.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor mulai tertekan akibat turunnya harga beberapa komoditas unggulan seperti batu bara dan CPO, serta melambatnya permintaan dari mitra utama seperti Tiongkok. Di sisi lain, nilai impor tetap tinggi, mencerminkan aktivitas produksi yang belum sepenuhnya pulih ke level optimal.

Ke depan, arah kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi kunci dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Dengan tekanan global yang belum mereda dan harga komoditas yang fluktuatif, Indonesia perlu mengandalkan penguatan konsumsi domestik, percepatan belanja fiskal, dan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan jangka menengah.

Tabel 2.1 Komposisi PDB Indonesia

Komponen	Growth 2022 (%, yoy)	Growth 2023 (%, yoy)	Growth 2024 (%, yoy)	Growth Q1-25 (%, yoy)	Share 2022 (% GDP)	Share 2023 (% GDP)	Share 2024 (% GDP)	Share Q1-25 (% GDP)
GDP	5.3	5,0	5,0	4,9	100	100	100	100
Konsumsi Rumah Tangga (C)	4.9	4,8	4,9	4,9	51.9	53,1	52,7	53,3
Pengeluaran Pemerintah (G)	-4.5	2,9	6,6	-1,4	7.7	7,4	7,4	5,8
Investasi (I)	3.9	4,4	4,6	2,1	29.1	29,3	31,0	30,0
Expor (X)	16.3	1,3	6,5	6,8	24.5	21,7	23,9	23,8
Impor (M)	14.75	-1,6	7,9	3,9	20.9	19,6	19,9	19,0

Sumber: BPS (2025)

Dari sisi sektoral, perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, yang berkontribusi sekitar 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada kuartal I-2025, sektor ini tumbuh sebesar 4,6% (yoy) — stabil, namun menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh subsektor makanan dan minuman yang tetap solid, mencerminkan struktur konsumsi rumah tangga Indonesia yang masih didominasi kebutuhan konsumtif. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional mengalami penurunan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, beberapa sektor berbasis jasa menunjukkan performa yang lebih dinamis dan cepat tumbuh. Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada Q1-2025 sebesar 9,0% (yoy), didorong oleh pemulihan mobilitas dan ekspansi logistik. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman tumbuh 5,8%, mencerminkan rebound pariwisata dan konsumsi domestik. Sementara sektor informasi dan komunikasi terus mencatat pertumbuhan stabil di kisaran 7,7%, didorong oleh digitalisasi ekonomi dan ekspansi infrastruktur TIK. Ketiga sektor ini menjadi pendorong utama diversifikasi ekonomi nasional, sekaligus mencerminkan pergeseran struktural menuju dominasi sektor jasa.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor

Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (yoy)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Q1
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,6	1,8	1,9	2,3	1,3	0,7	10,5
B. Pertambangan dan Penggalan	1,2	-2,0	4,0	4,4	6,1	4,9	-1,2
C. Industri Pengolahan	3,8	-2,9	3,4	4,9	4,6	4,4	4,6
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,0	-2,3	5,6	6,6	4,9	4,8	5,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,8	4,9	5,0	3,2	4,9	1,6	0,2
F. Konstruksi	5,8	-3,3	2,8	2,0	4,9	7,0	2,2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	-3,8	4,6	5,5	4,9	4,9	5,0
H. Transportasi dan Pergudangan	6,4	-15,1	3,2	19,9	14,0	8,7	9,0
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	-10,3	3,9	12,0	10,0	8,6	5,8
J. Informasi dan Komunikasi	9,4	10,6	6,8	7,7	7,6	7,6	7,7
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	3,3	1,6	1,9	4,8	4,7	4,0
L. Real Estate	5,8	2,3	2,8	1,7	1,4	2,5	2,9
M,N. Jasa Perusahaan	10,3	-5,4	0,7	8,8	8,2	8,4	9,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	0,0	-0,3	2,5	1,5	6,4	4,8
P. Jasa Pendidikan	6,3	2,6	0,1	0,6	1,8	3,8	5,0
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	11,6	10,5	2,7	4,7	8,1	5,8
R,S,T,U. Jasa lainnya	10,6	-4,1	2,1	9,5	10,5	9,8	9,8

Sumber: BPS (2025)

Namun demikian, sektor industri pengolahan menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Sektor industri pengolahan di Indonesia masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2010, kontribusi industri pengolahan mencapai 22% terhadap PDB, namun angka ini turun menjadi sekitar 20% pada tahun 2025.

Tekanan datang dari meningkatnya persaingan global, terutama dari Tiongkok yang unggul dalam skala produksi dan efisiensi biaya, serta dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang semakin kompetitif dalam menarik investasi manufaktur. Vietnam, khususnya, berhasil menjadi destinasi utama foreign direct investment (FDI) di sektor pengolahan melalui kebijakan fiskal yang agresif, regulasi yang fleksibel, dan biaya tenaga kerja yang rendah.

Di dalam negeri, pertumbuhan industri pengolahan masih belum merata. Beberapa provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan industri yang tinggi, terutama karena ekspansi industri logam dasar dan hilirisasi mineral. Namun, di wilayah lain, pertumbuhan industri cenderung stagnan atau bahkan kontraktif. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya strategi industrialisasi yang lebih terarah, berbasis keunggulan lokal, serta didukung oleh ekosistem pendukung seperti infrastruktur, energi, dan kualitas SDM. Ke depan, mempertahankan daya saing sektor industri akan menjadi kunci dalam menjaga fondasi ekonomi riil Indonesia tetap kokoh di tengah disrupsi global.

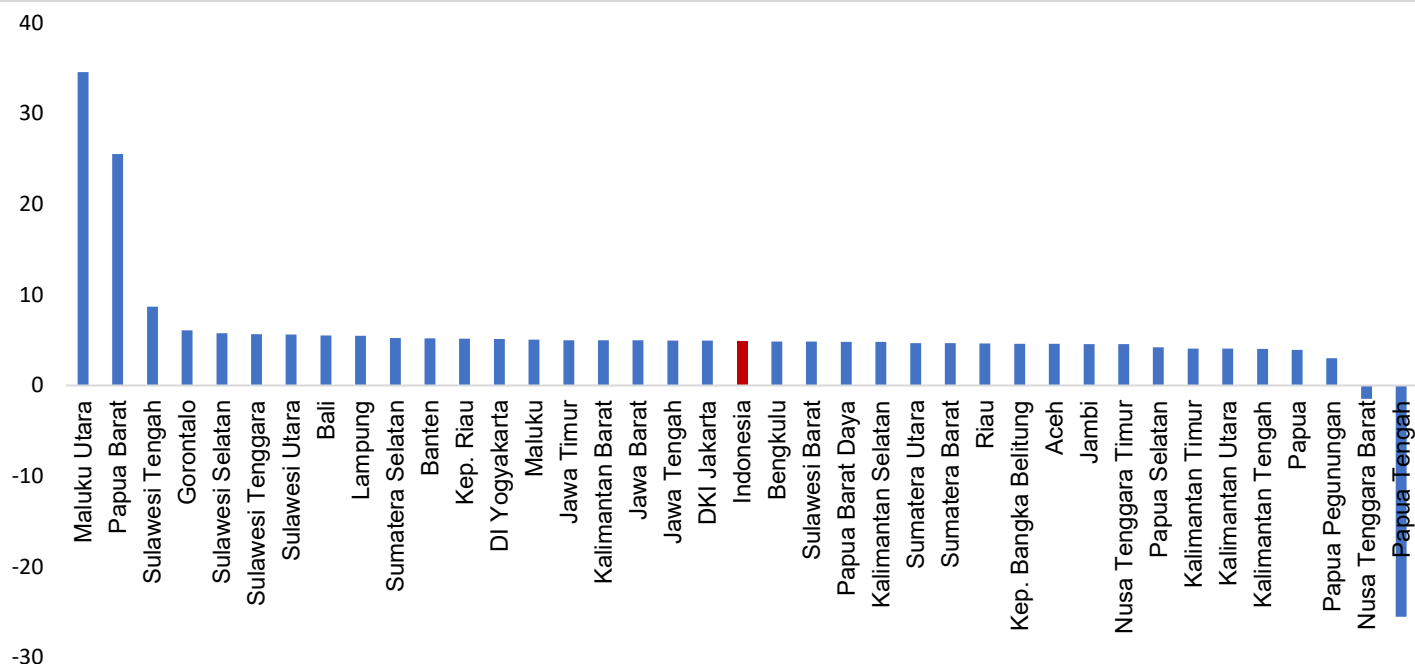
Ke depan, strategi transformasi industri manufaktur Indonesia perlu difokuskan pada penguatan fondasi jangka panjang yang menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan memperluas kapasitas industri dalam negeri. Beberapa langkah kunci yang perlu diakselerasi antara lain: pemberian insentif fiskal bagi sektor industri berorientasi ekspor dan teknologi tinggi; penciptaan lapangan kerja formal melalui penguatan sektor padat karya yang bernilai tambah; serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan akses pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Selain itu, perbaikan reformasi birokrasi, digitalisasi perizinan, dan penguatan kepastian hukum untuk menarik investasi menjadi poin krusial. Di sisi lain, penguatan infrastruktur fisik perlu terus dilanjutkan, terutama pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang terintegrasi dengan pelabuhan, jalan tol, dan sistem logistik yang efisien. Mengingat struktur geografis Indonesia yang kepulauan, penurunan biaya logistik nasional menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Untuk itu, arah transformasi manufaktur harus berpijak pada inovasi, digitalisasi proses produksi, dan diversifikasi pasar — agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas primer, tetapi mampu bersaing dalam rantai nilai industri global.

2.1 Kinerja Ekonomi Regional

Gambar 2.2 PDRB Provinsi Q1-2025

Wilayah timur Indonesia mendorong pertumbuhan nasional pada Q1-2025 berkat hilirisasi mineral, namun rentan terhadap fluktuasi harga global.



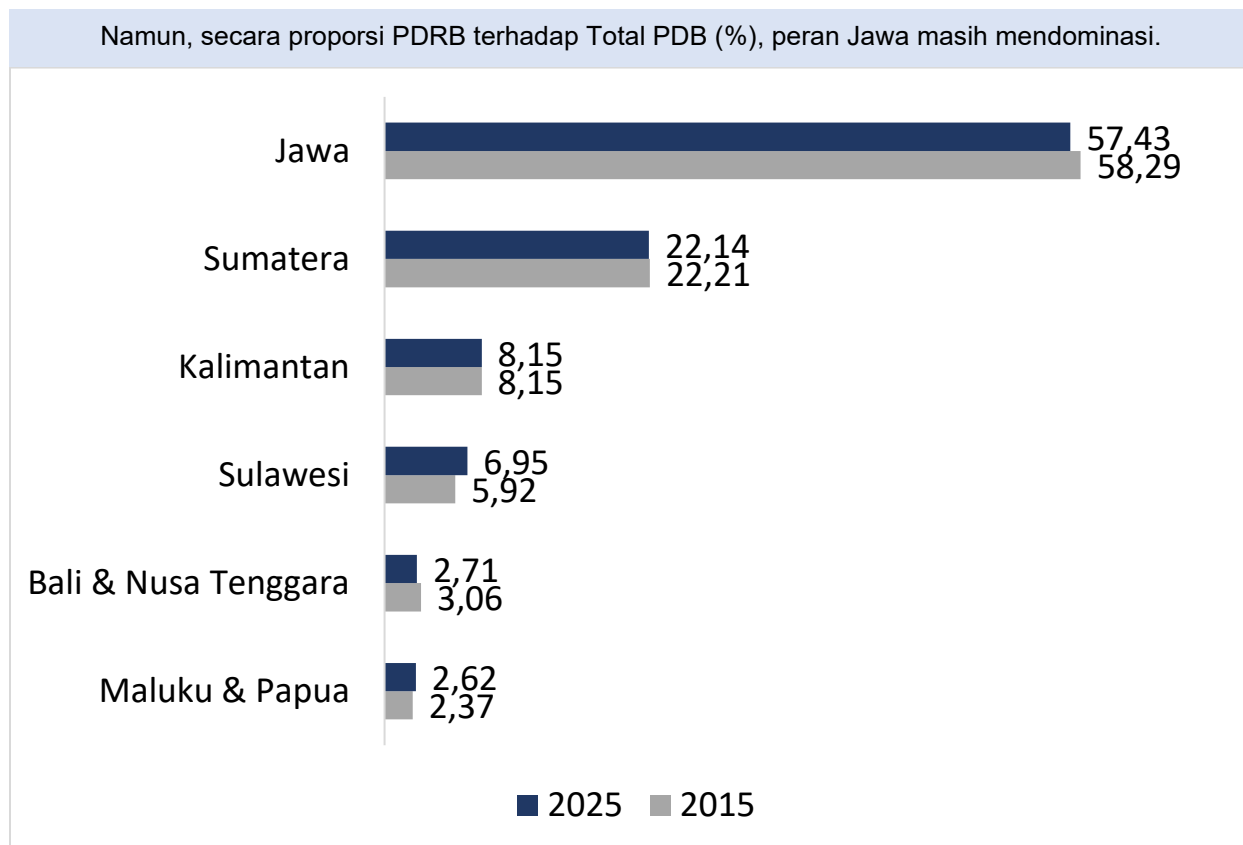
Sumber: BPS (2025)

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur menunjukkan kinerja yang sangat impresif, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal ketiga tahun 2024, pertumbuhan tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 34,6% (yoy), diikuti oleh Sulawesi Tengah (26,0%) dan Sulawesi Selatan (8,9%). Pertumbuhan pesat ini sebagian besar didorong oleh ekspansi industri hilirisasi tambang, sejalan dengan fokus strategis pemerintah dalam mendorong nilai tambah komoditas mineral di wilayah tersebut.

Meskipun kawasan timur Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan, belum terjadi pergeseran struktural yang signifikan dalam distribusi ekonomi nasional. Pulau Jawa masih menjadi pusat utama kegiatan ekonomi. Pada tahun 2015, kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB nasional mencapai 58,29%, dan sepuluh tahun kemudian hanya turun tipis menjadi 57,43% pada tahun 2025. Artinya, kunci pertumbuhan dan struktur ekonomi nasional masih didominasi Pulau Jawa secara substansial dalam ekonomi nasional. Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pertumbuhan di wilayah luar

Jawa bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya saing kawasan secara menyeluruh.

Gambar 2.3 Proporsi PDRB (% GDP)



Sumber: BPS (2025)

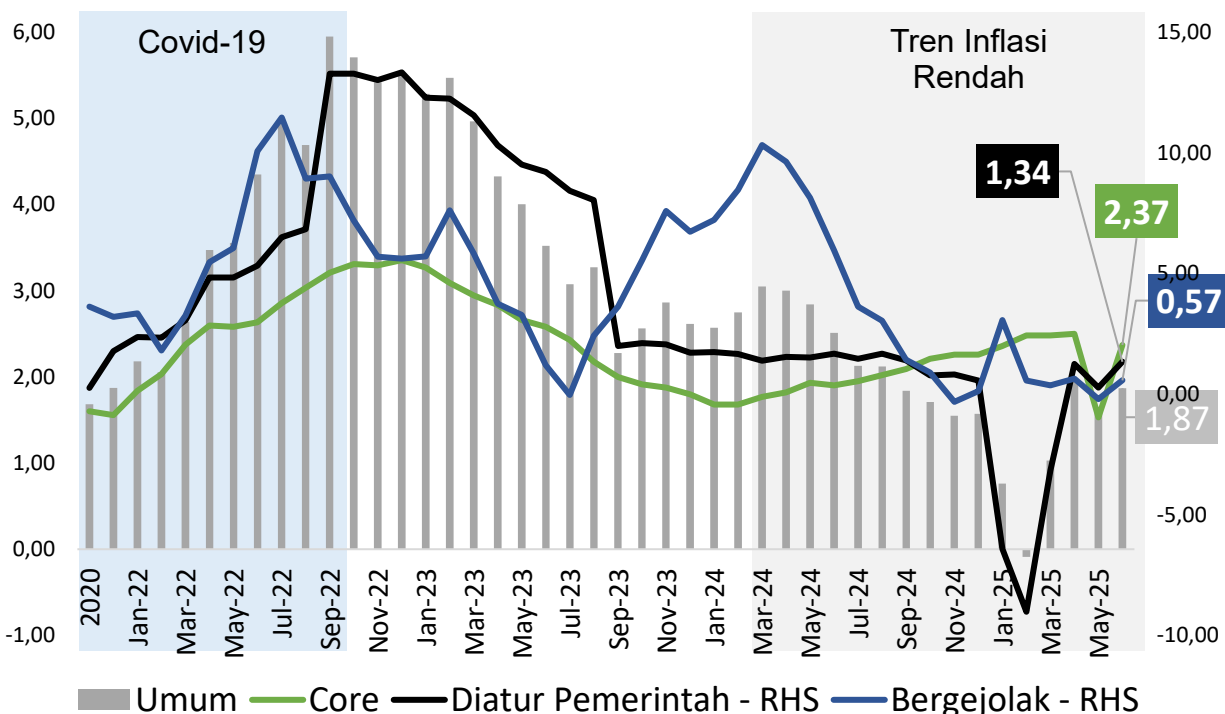
2.2 Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Juni 2025 sebesar 1,87% (yoy). Bahkan, tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19, menandai era inflasi rendah dan perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Meski inflasi rendah secara langsung diasosiasikan dengan keberhasilan pengendalian harga, kondisi ini menyiratkan tantangan struktural yang lebih dalam, terutama terkait penurunan daya beli masyarakat dan lemahnya permintaan domestik. Situasi ini mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih, dan masyarakat masih menahan belanja di tengah ketidakpastian ekonomi. Jika tidak diantisipasi, inflasi yang terlalu rendah berisiko menahan laju pemulihan ekonomi dan berdampak pada prospek pertumbuhan jangka menengah. Karena itu, dibutuhkan sinergi

kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pemulihan permintaan secara berkelanjutan.

Gambar 2.4 Inflasi Indonesia (% , yoy)



Sumber: BPS dan CEIC, Juli (2025)

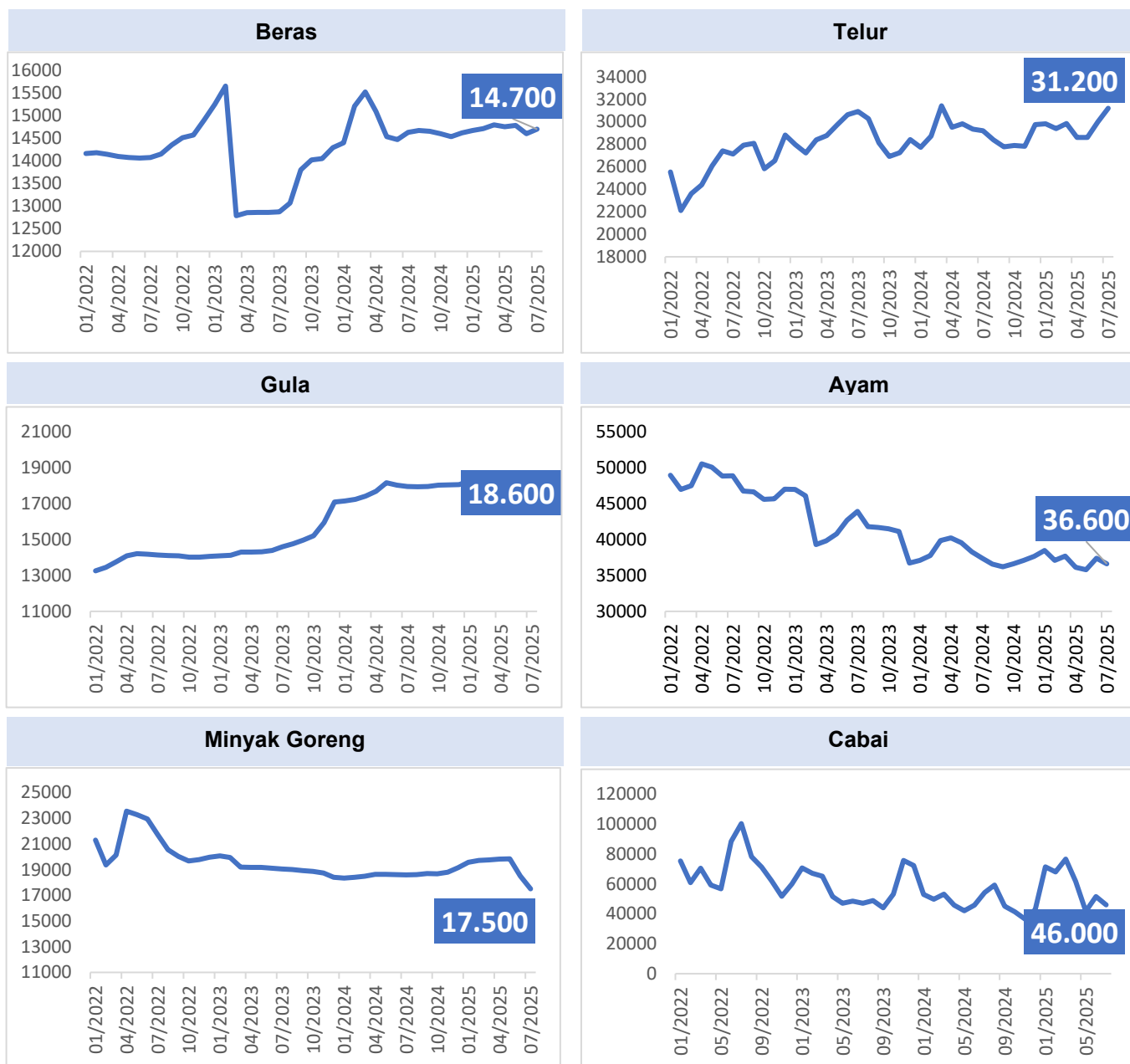
Dari sisi *supply*, penurunan inflasi diakibatkan oleh stabilnya harga pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM). Inflasi harga bergejolak menurun signifikan hingga hanya 0,57% (yoy), sementara inflasi harga yang diatur pemerintah tercatat sebesar 1,34% (yoy) pada Juni 2025. Penurunan ini didorong oleh program stabilisasi harga pangan strategis serta kondisi pasokan yang membaik, terutama setelah musim panen pasca-EI Nino.

Sementara itu, inflasi inti (*core inflation*) yang menggambarkan permintaan riil masyarakat juga mengalami perlambatan menjadi 2,37%. Bahkan, inflasi umum (*headline inflation*) pada Juni 2025 hanya mencapai 1,87% (yoy), mencerminkan pelemahan konsumsi rumah tangga dan kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya.

Pada tahun 2025, harga sejumlah komoditas pangan strategis menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil. Harga beras, telur, minyak goreng, dan cabai tidak mengalami lonjakan berarti dan cenderung bergerak mendatar hingga pertengahan

tahun. Harga ayam bahkan terus melandai, mencerminkan suplai yang cukup di pasar domestik dan efisiensi distribusi. Stabilitas ini juga menunjukkan keberhasilan kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah, termasuk koordinasi dengan pelaku usaha dan optimalisasi cadangan pangan.

Gambar 2.5 Harga Pangan



Sumber: CEIC & Kemendag (2025)

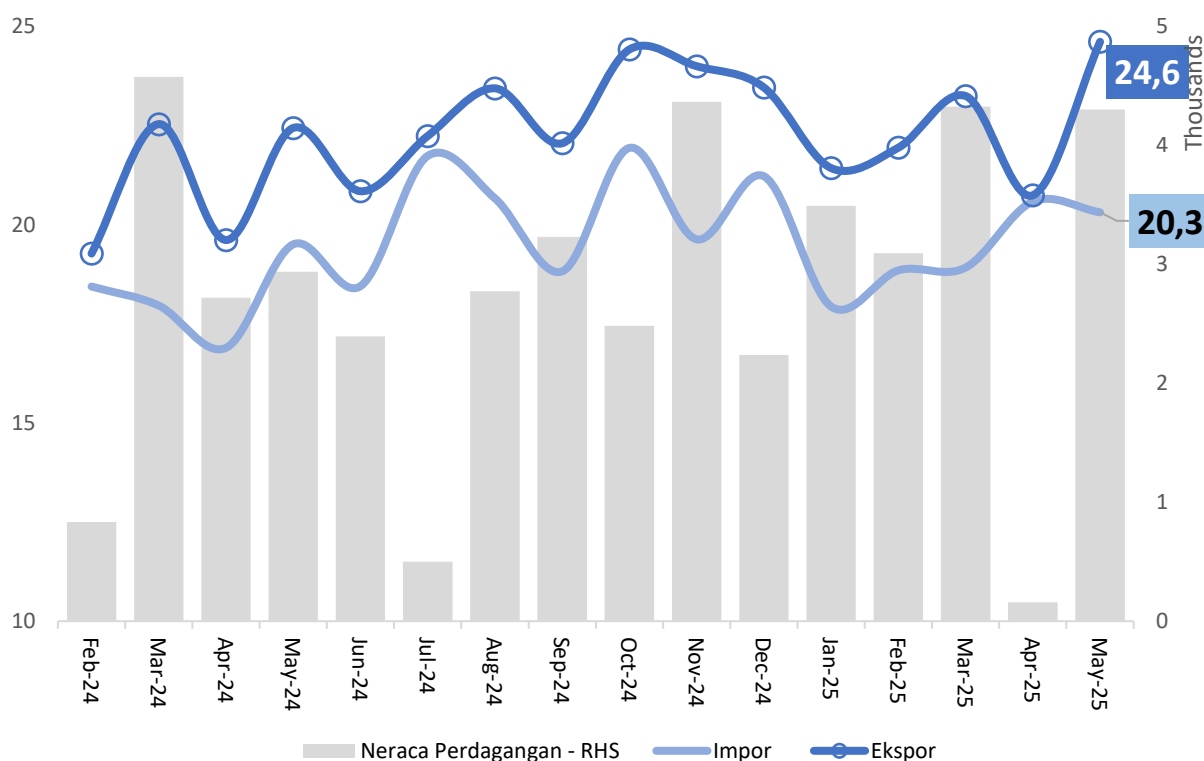
Satu-satunya komoditas yang masih mencatat tekanan harga adalah gula, yang terus mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan global. Gangguan iklim di negara eksportir utama seperti Brasil serta kebijakan pembatasan ekspor di India menjadi faktor

utama yang menekan ketersediaan gula di pasar internasional. Lonjakan harga gula ini bersifat sektoral dan belum cukup untuk mendorong inflasi ke atas secara keseluruhan. Dengan kondisi ini, tekanan inflasi dari sisi pangan relatif terkendali dan mendukung terciptanya tren inflasi rendah yang sedang berlangsung.

2.3 Neraca Pembayaran

Kinerja perdagangan Indonesia pada Mei 2025 menunjukkan perbaikan signifikan. Neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD 4,3 miliar, seiring dengan nilai ekspor yang meningkat menjadi USD 24,6 miliar, sementara impor tercatat sebesar USD 20,3 miliar. Tren ini menandai keberlanjutan surplus perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun berturut-turut, sekaligus mencerminkan ketahanan sektor eksternal di tengah tantangan global. Secara Year to Date (YTD) Januari sampai Mei 2025, Indonesia mencatatkan surplus US\$ 15,28 Miliar atau naik US\$ 2,32 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu Januari sampai dengan Mei 2024.

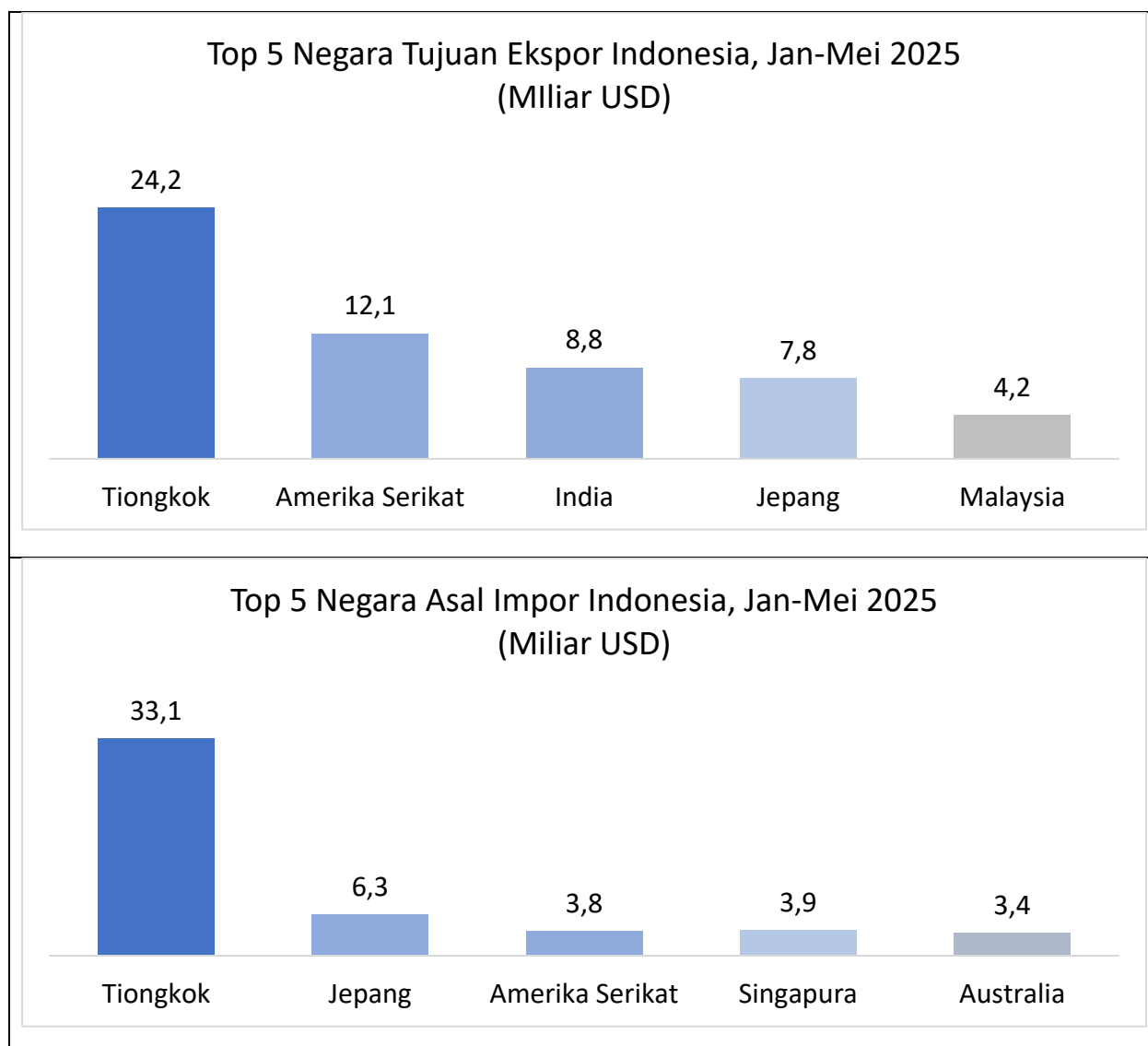
Gambar 2.6 Neraca Perdagangan (Miliar USD)



Sumber: BPS (2025)

Peningkatan surplus terutama didorong oleh ekspor non-migas, yang masih menjadi tulang punggung ekspor nasional. Sepanjang Januari sampai Mei 2025, Tiongkok tercatat sebagai mitra dagang utama dengan nilai ekspor sebesar USD 24,2 miliar, diikuti oleh Amerika Serikat (USD 12,1 miliar) dan India (USD 8,8 miliar). Di sisi impor, Tiongkok juga menjadi negara asal impor terbesar dengan nilai mencapai USD 33,1 miliar, menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku dan barang modal dari negara tersebut. Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Australia turut masuk dalam jajaran lima besar mitra impor Indonesia.

Gambar 2.7 Negara Tujuan dan Asal



Sumber: BPS (2025)

Kinerja ekspor Indonesia turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara mitra, terutama Tiongkok. Pasalnya, Tiongkok merupakan tujuan ekspor utama dan terbesar bagi

Indonesia. Pelemahan ekonomi Tiongkok menjadi tantangan tersendiri, terlihat dari pertumbuhan impor negara tersebut yang masih rendah. Dengan melambatnya permintaan dari Tiongkok, ekspor Indonesia ke negara tersebut kemungkinan besar akan tertekan.

Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok terus meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa impor barang dari Tiongkok ke Indonesia tumbuh dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, sementara ekspor Indonesia ke Tiongkok melonjak lebih dari tiga kali lipat. Sebaliknya, hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, mitra dagang terbesar kedua, cenderung stagnan. Padahal, pada tahun 2014, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok dan Amerika Serikat hampir setara.

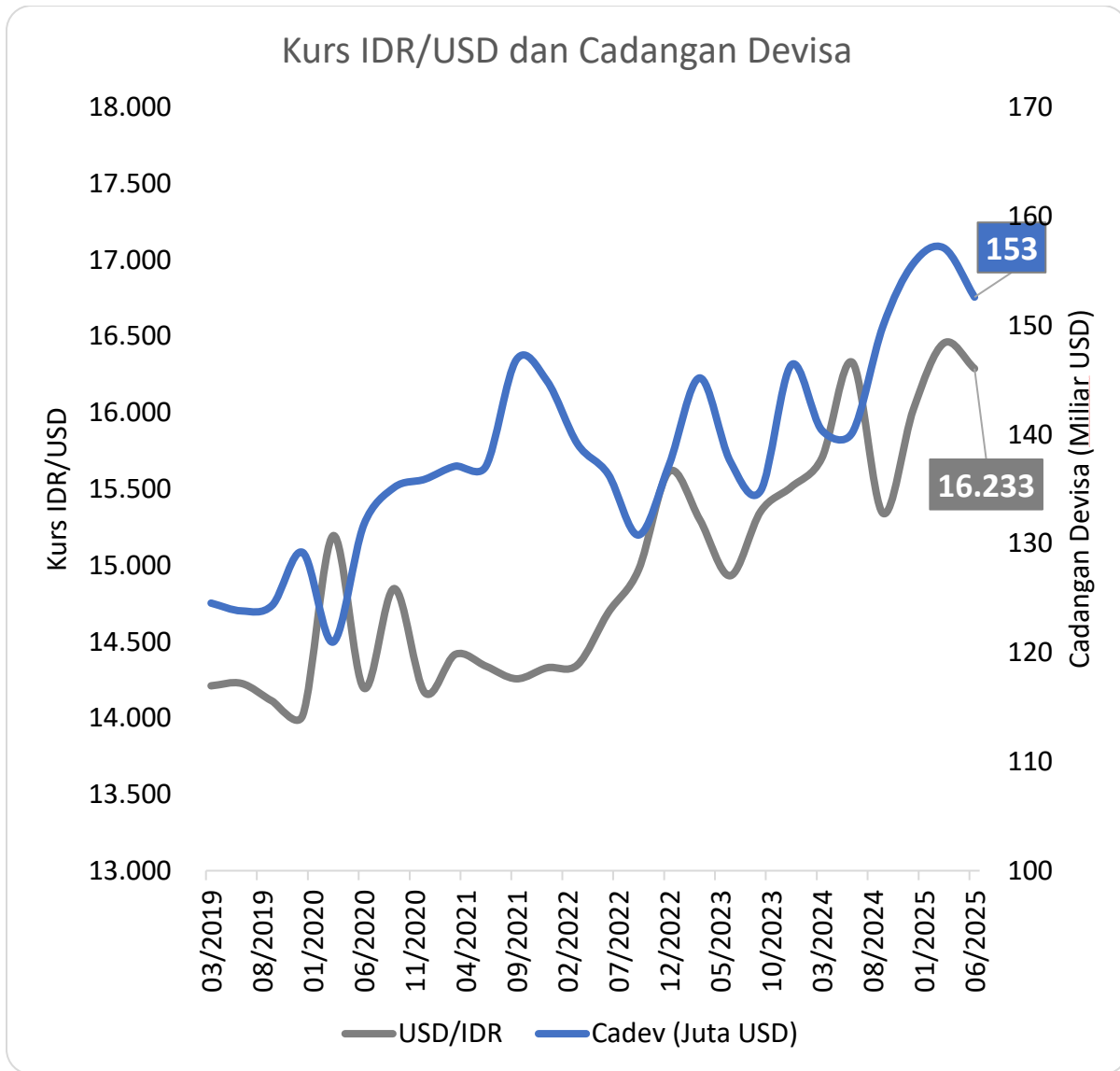
Hubungan erat antara Indonesia dengan Tiongkok dapat semakin mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia dengan AS. Pasalnya, perang dagang antara Tiongkok dan AS semakin memanaskan dengan AS menetapkan kebijakan yang lebih restriktif untuk produk – produk asal Tiongkok. Kondisi ini dapat memengaruhi kinerja *indirect export* Indonesia ke AS untuk produk Tiongkok yang diproses atau dikirim dari Indonesia serta ekspor produk Tiongkok yang diproduksi di Indonesia.

Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) dan turut mendorong kenaikan cadangan devisa menjadi USD 153 miliar pada April 2025 dan mencapai level tertinggi sejak pandemi. Penguatan cadangan devisa ini seharusnya menjadi penopang utama stabilitas nilai tukar rupiah. Namun demikian, yang terjadi di lapangan menunjukkan dinamika berbeda: nilai tukar rupiah terhadap dolar AS justru melemah, menembus level Rp16.233 per USD.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap rupiah lebih didominasi oleh sentimen eksternal, khususnya terkait ekspektasi bahwa penurunan suku bunga The Fed akan lebih lambat dari perkiraan. Kondisi ini membuat aset-aset keuangan di Amerika Serikat menjadi lebih menarik bagi investor global, sehingga memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap yuan Tiongkok (RMB/IDR) juga tercatat melemah ke level 2.265, menambah tekanan terhadap stabilitas nilai tukar secara umum.

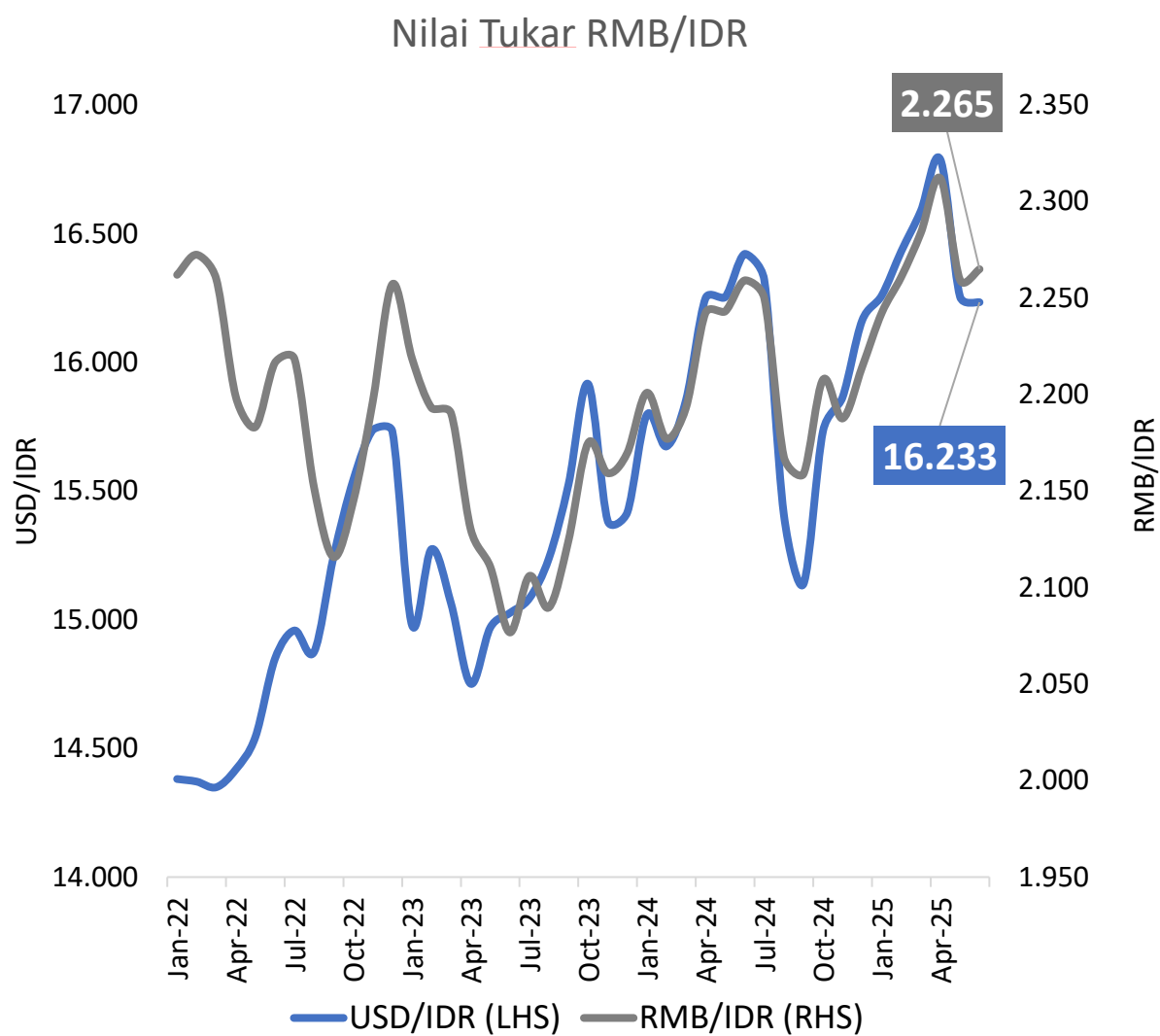
Ke depan, Bank Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas rupiah, terutama di tengah ketidakpastian global dan potensi volatilitas arus modal. Sikap kebijakan moneter yang cenderung hati-hati yang tercermin dari tertahannya penurunan suku bunga acuan menunjukkan bahwa stabilisasi nilai tukar menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, keberlanjutan surplus eksternal dan kredibilitas bauran kebijakan moneter-fiskal akan menjadi kunci menjaga ketahanan eksternal Indonesia.

Gambar 2.8 Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Gambar 2.9 Nilai Tukar USD dan RMB



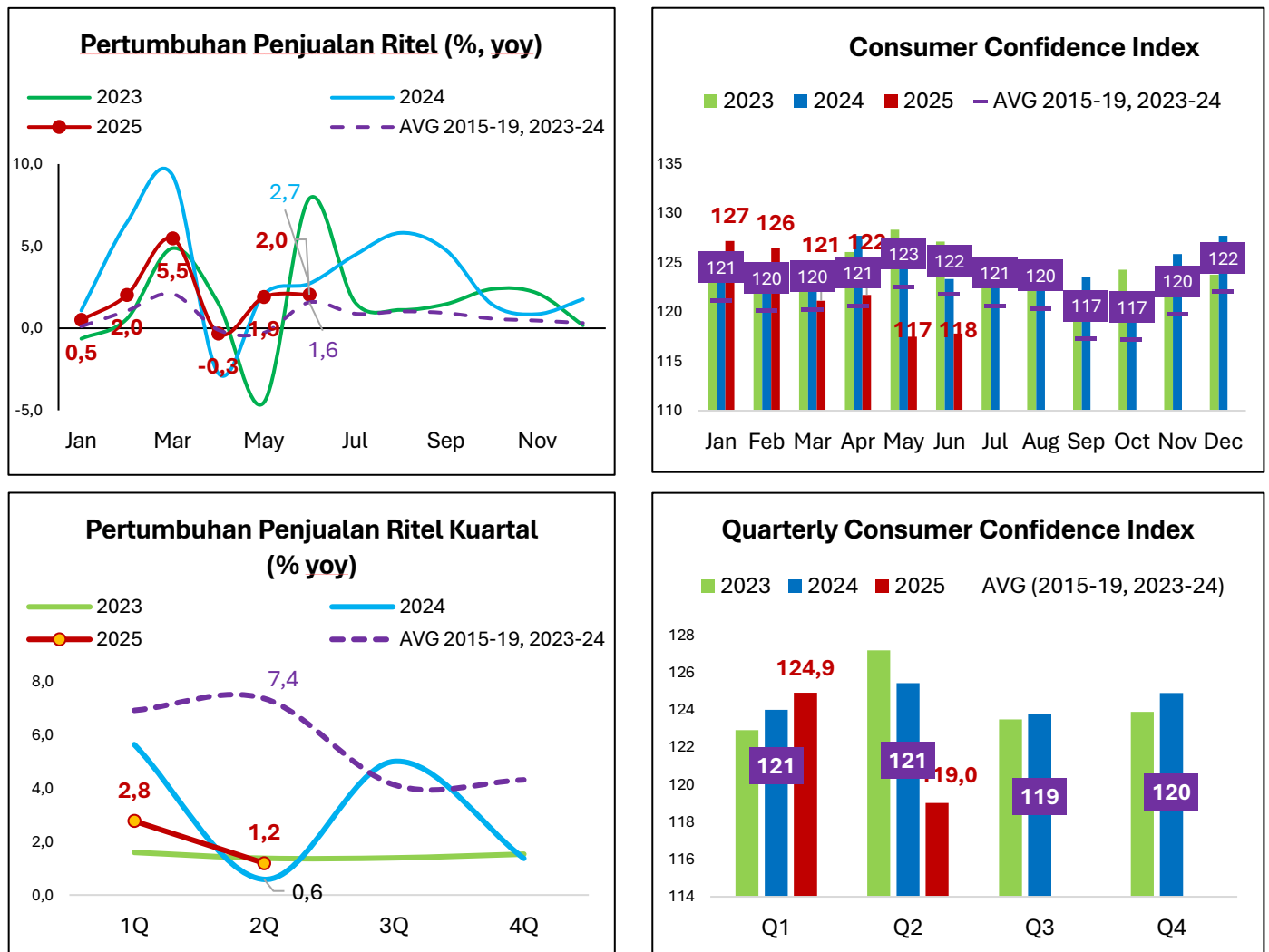
Sumber: Bank Indonesia (2025)

2.4 Pelemahan Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga menunjukkan tren pelemahan pada Kuartal II 2025, tercermin dari melambatnya pertumbuhan penjualan ritel dan menurunnya indeks keyakinan konsumen. Data terkini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menahan pengeluaran, tidak hanya karena faktor musiman, tetapi juga akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan prospek pendapatan.

Pada Kuartal II 2025, pertumbuhan penjualan ritel agregat tercatat sebesar 2,0% (yoy), menurun dibandingkan Kuartal I 2025 yang sebesar 2,7% (yoy). Secara kuartalan, pertumbuhan penjualan ritel juga menunjukkan perlambatan. Pada Kuartal II 2025, tercatat sebesar 1,2% (yoy), menurun dibandingkan Kuartal I 2025 yang sebesar 2,8% (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh pola musiman dan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara lebih hati-hati.

Gambar 2.10 Pertumbuhan Penjualan Ritel & Consumer Confidence Index



Sumber: BPS dan OCE Bank Mandiri (2025)

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan tren penurunan pada Kuartal II 2025. Setelah mencapai level 123 pada Maret 2025, IKK menurun menjadi 117 pada Mei dan 118 pada Juni 2025. Pada Kuartal II 2025, seluruh komponen utama Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan dibandingkan Kuartal sebelumnya. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 124,9 menjadi 119,0, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mengalami koreksi dari 121 menjadi 119. Hal ini mengindikasikan melemahnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan.

Melambatnya pertumbuhan penjualan ritel serta penurunan indeks keyakinan konsumen menunjukkan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya. Dinamika ini perlu dicermati mengingat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

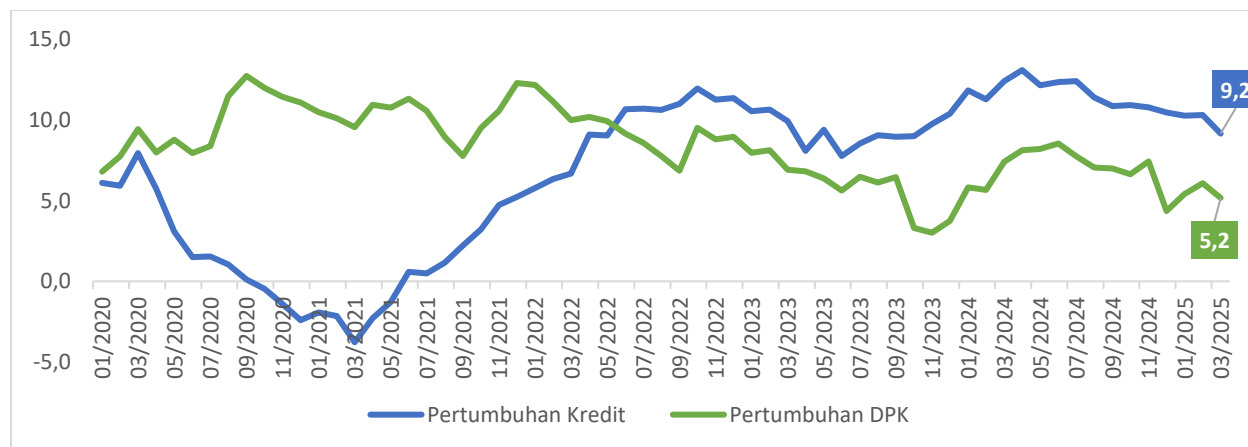
KINERJA PERBANKAN

3. KINERJA PERBANKAN

Memasuki tahun 2025, sektor perbankan Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan eksternal maupun domestik. Pertumbuhan kredit mencapai 9,2% (yoy) pada Triwulan-I 2025, menandakan bahwa fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dengan baik dan permintaan pembiayaan dari sektor riil tetap solid. Tren ini menunjukkan adanya keyakinan pelaku usaha dan rumah tangga dalam memanfaatkan fasilitas kredit untuk kebutuhan konsumsi maupun investasi. Stabilitas sistem keuangan serta transmisi kebijakan moneter yang tetap terjaga juga menjadi faktor pendukung keberlanjutan ekspansi kredit ini.

Namun, di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami perlambatan signifikan, turun menjadi hanya 5,2% (yoy) pada periode yang sama. Kondisi ini mencerminkan mulai terbatasnya ruang bagi bank dalam menghimpun likuiditas baru. Penurunan DPK ini berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas, khususnya jika tren penyaluran kredit tetap tumbuh kuat tanpa diimbangi pertumbuhan dana yang memadai. Perbankan pun perlu lebih selektif dalam ekspansi kredit dan mengelola struktur pendanaannya secara hati-hati.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Kredit dan DPK (%)



Sumber: OJK (2025)

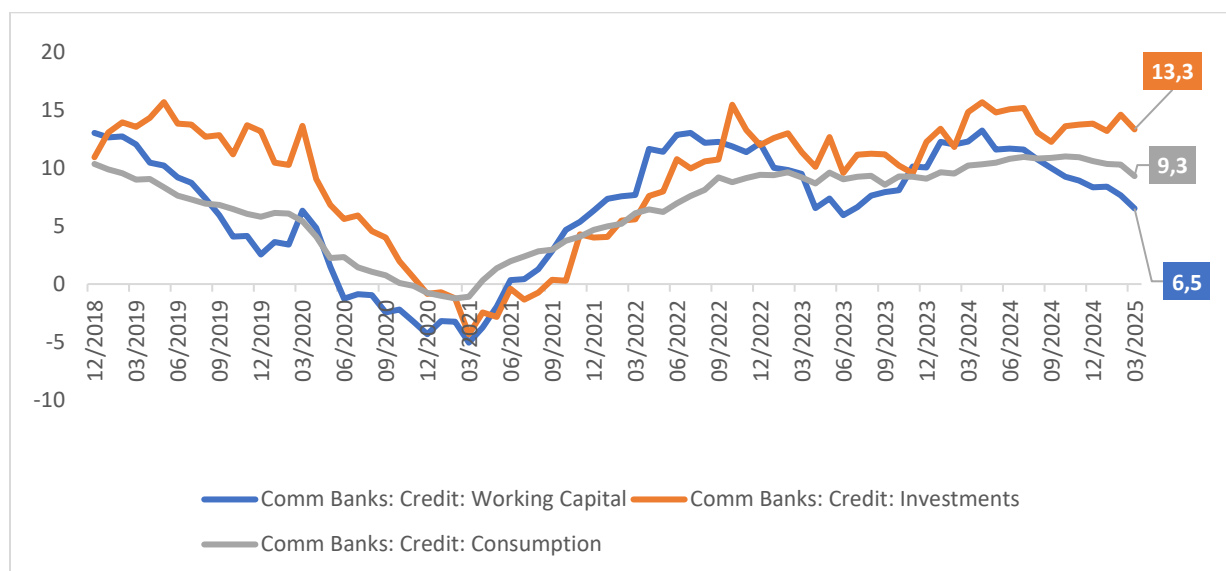
3.1 Kredit Perbankan

Pertumbuhan kredit perbankan berdasarkan jenis penggunaan menunjukkan dinamika yang beragam hingga Maret 2025. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,3% (yoy), menandakan bahwa sektor usaha masih memiliki optimisme untuk melakukan ekspansi jangka panjang. Peningkatan ini sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta upaya peningkatan kapasitas produksi di berbagai sektor strategis. Tren ini juga menunjukkan

bahwa meskipun kondisi likuiditas mulai menegat, pelaku usaha masih melihat prospek usaha ke depan secara positif.

Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh stabil di level 9,3%, mencerminkan permintaan rumah tangga yang relatif terjaga, terutama pada segmen menengah-atas. Namun, kredit modal kerja hanya tumbuh 6,5%, dan menunjukkan tren menurun sejak akhir 2024. Hal ini mengindikasikan adanya potensi perlambatan aktivitas operasional jangka pendek dari dunia usaha, seiring tekanan biaya, ketidakpastian permintaan, dan pengetatan likuiditas. Ke depan, sektor perbankan perlu mencermati perkembangan ini secara seksama, mengingat kredit modal kerja mencerminkan denyut aktivitas ekonomi riil yang bersifat harian dan jangka pendek.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Kredit Jenis (% , yoy)

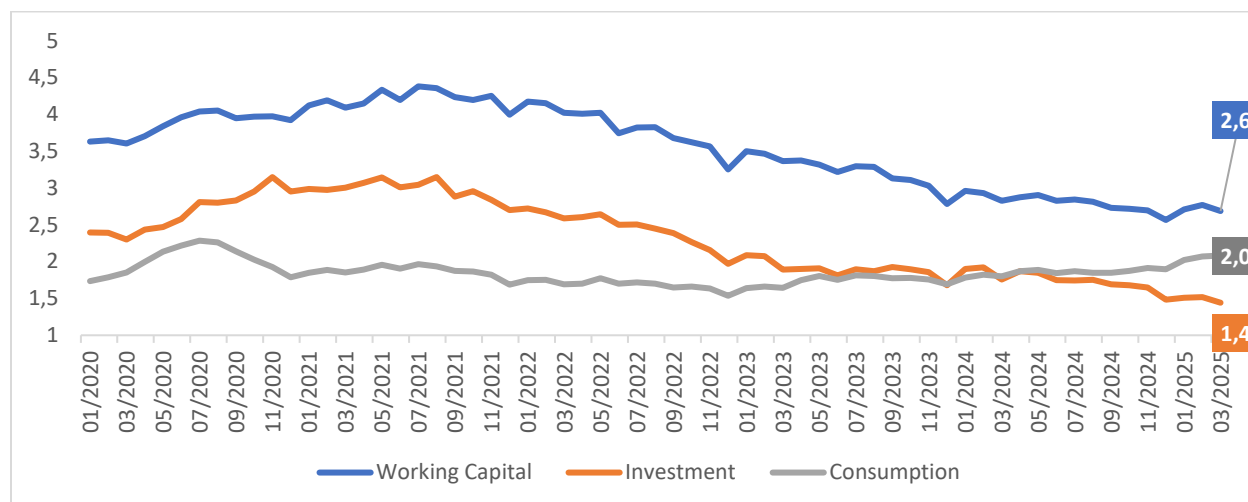


Sumber: OJK & CEIC (2025)

Pada Maret 2025, rasio NPL kredit perbankan menunjukkan dinamika yang bervariasi. NPL konsumsi mengalami kenaikan menjadi 2,0%, mencerminkan adanya tekanan terhadap kemampuan bayar rumah tangga, sejalan dengan perlambatan daya beli dan sentimen kehati-hatian dalam konsumsi. Kenaikan ini perlu dicermati secara saksama mengingat segmen ini cukup sensitif terhadap fluktuasi ekonomi.

Sementara itu, NPL kredit modal kerja menurun ke 2,6%, mengindikasikan masih terjaganya kualitas kredit di sektor usaha jangka pendek meskipun aktivitas operasional belum sepenuhnya pulih. Penurunan juga terjadi pada NPL kredit investasi yang tercatat sebesar 1,4%, sejalan dengan profil risiko jangka panjang yang cenderung lebih stabil. Perkembangan ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas aset perbankan masih berada dalam batas yang terkelola dengan baik, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan terhadap tekanan lanjutan dari sisi konsumsi.

Gambar 3.3 NPL Jenis (%)



Sumber: OJK (2025)

Data menunjukkan bahwa rata-rata saldo tabungan masyarakat di Indonesia terus menurun sejak 2018, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kuartal II-2025, rata-rata saldo nasional tercatat hanya Rp14,5 juta, jauh di bawah level tahun 2018 yang mencapai Rp20,7 juta. Penurunan paling tajam terjadi pada kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta, yang turun dari Rp3,1 juta (2018) menjadi hanya Rp1,7 juta pada kuartal II-2025. Fenomena ini dikenal sebagai “mantab” atau makan tabungan, mencerminkan kondisi di mana masyarakat, terutama kelas bawah, terpaksa menarik simpanannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Penurunan saldo tabungan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir, seperti menurunnya kualitas pasar tenaga kerja, serta minimnya ruang fiskal untuk bantuan langsung yang berkelanjutan. Kelompok menengah dan besar cenderung mempertahankan atau meningkatkan saldo tabungan, sebaliknya kelompok berpendapatan rendah masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap tabungan dan instrumen perlindungan keuangan. Jika tidak direspon dengan kebijakan inklusif dan penguatan jaring pengaman sosial, tren ini berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat pemulihan konsumsi rumah tangga nasional.

Tabel 3.1 Rata-Rata Saldo Per Rekening di Indonesia (Rp Juta)

Tahun	Rata-Rata Nasional	Kecil	Menengah-Kecil		Menengah-Besar		Besar	
		<Rp100jt	Rp100-200jt	Rp200-500jt	Rp500jt-1M	Rp1-2M	Rp2-5M	>Rp5M
2018	20,7	3,1	140,4	321,3	727,4	1.431	3.131	27.626
2019	20,1	3,0	140,3	320,2	723,1	1.423	3.125	27.293
2020	19,2	2,8	140,1	320,0	722,5	1.423	3.123	29.095
2021	19,5	2,6	140,0	318,3	719,1	1.413	3.136	31.660
2022	16,1	2,0	140,4	319,5	722,5	1.419	3.172	33.491
2023	14,9	1,9	140,6	320,0	722,3	1.421	2.323	32.329
2024	14,5	1,8	138,4	319,1	720,9	1.421	3.195	32.630
Q1-2025	14,6	1,8	140,5	319,2	719,2	1.417	3.188	33.936
Q2-2025	14,5	1,7	140,5	319,3	719,3	1.417	3.197	34.216

Sumber: LPS (2025)

Pertumbuhan kredit perbankan pada awal 2025 menunjukkan akselerasi yang kuat di sejumlah sektor padat modal. Hingga Maret 2025, sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 25,5% (yoy), seiring dengan meningkatnya aktivitas hilirisasi dan ekspansi industri mineral.

Selain itu, sektor listrik, gas, dan air mencatat pertumbuhan dua digit sebesar 18,8% (yoy), menunjukkan berlanjutnya investasi di bidang infrastruktur energi dan utilitas publik. Sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi juga mencatat pertumbuhan kredit tinggi, yakni 14,2% (yoy), mencerminkan terus meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk logistik dan infrastruktur digital.

Namun, kredit untuk sektor industri pengolahan menunjukkan tren pelemahan dimana pada triwulan-1 2025 hanya tumbuh sekitar 8,8% (yoy). Perdagangan besar dan eceran tumbuh melambat 3,9% (yoy). Selain itu, sejumlah sektor masih menunjukkan tekanan. Kredit ke sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga tercatat mengalami kontraksi sebesar -8% (yoy), menunjukkan masih lemahnya pembiayaan untuk sektor informal dan rumah tangga pekerja mandiri. Hal serupa terjadi pada badan internasional dan lembaga ekstrasnasional, yang sejak 2023 konsisten mencatatkan pertumbuhan negatif. Secara umum, arah pembiayaan perbankan cenderung mengarah ke sektor produktif dan padat modal, sedangkan sektor konsumtif mengalami perlambatan pertumbuhan kredit, seiring dengan tingginya risiko dan terbatasnya prospek permintaan.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Kredit Sektoral (%yoy)

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Jan	2025 Feb	2025 Mar
Total Kredit	6,1	-2,4	5,2	11,4	10,4	10,5	10,3	10,3	9,2
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	4,2	4,2	7,8	10,3	8,6	5,2	5,3	6,4	5,3
Perikanan	16,3	13,6	16,6	5,6	5,4	-4,9	-4,7	-4,3	-6,1
Pertambangan dan Penggalian	-2,6	-7,2	23,4	54,3	22,4	28,6	26,3	24,3	25,5
Industri Pengolahan	3,6	-4,1	6,4	12,2	4,7	9,6	10,1	11,5	8,8
Listrik, gas dan air	16,5	-14,8	-5,4	1,6	13,3	19,7	17,3	19,1	18,8
Konstruksi	14,6	3,9	1,0	4,3	-0,4	0,0	0,1	0,5	0,0
Perdagangan Besar dan Eceran	3,1	-6,4	3,4	7,1	9,1	4,2	4,3	3,2	2,6
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	10,1	5,8	3,9	2,4	5,8	5,0	5,1	4,9	5,9
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	13,6	7,8	15,0	2,2	19,3	19,2	20,2	19,5	14,2
Perantara Keuangan	2,2	-13,4	3,9	36,1	20,9	21,5	20,1	16,6	9,4
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,5	-3,5	2,1	18,6	13,2	5,6	3,6	6,4	7,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,3	6,9	11,0	27,9	49,0	48,1	47,1	49,4	48,3
Jasa Pendidikan	15,2	-4,2	2,9	6,5	13,3	6,1	5,8	6,2	6,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,9	-15,8	0,9	10,6	18,7	24,8	25,5	25,4	24,5
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	3,3	8,4	7,0	19,8	38,3	11,6	10,8	11,9	26,8
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	25,8	-12,5	29,5	2,9	0,4	-9,2	-9,0	-8,2	-8,0
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	61,8	28,1	1,9	-94,1	-17,0	-38,9	-38,3	-37,3	-37,9

Sumber: OJK dan CEIC (2025)

Struktur kredit perbankan menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan menempati posisi dominan, baik dari sisi porsi terhadap total kredit maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua sektor ini berada di kuadran kanan atas, mencerminkan bahwa bank cenderung menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Fenomena ini memperkuat prinsip bahwa bisnis perbankan “follows the money” — mengikuti pusat-pusat aktivitas ekonomi yang memiliki potensi pembiayaan tinggi dan risiko yang lebih terukur.

Sementara itu, beberapa sektor dengan pertumbuhan kredit tinggi seperti Pertambangan, Transportasi-Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan justru memiliki porsi PDB yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya dorongan ekspansi kredit yang kuat pada sektor-sektor tertentu yang sedang mengalami transformasi struktural atau didorong oleh kebijakan pemerintah, seperti hilirisasi tambang, infrastruktur logistik, dan digitalisasi pelayanan publik. Meski kontribusi sektoral terhadap PDB masih terbatas, tren ini menandakan peluang pertumbuhan jangka menengah bagi lembaga keuangan yang mampu mengelola risiko sektoral secara cermat.

Di sisi lain, sejumlah sektor seperti Akomodasi dan Makanan Minuman, Listrik, Gas, dan Air, Jasa Kesehatan, Pertambangan, serta Administrasi Pemerintahan berada di area dengan pertumbuhan kredit tinggi namun kontribusinya terhadap PDB masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan mulai mendorong ekspansi ke sektor-sektor yang tengah bertumbuh atau dipacu oleh agenda strategis nasional, seperti hilirisasi sumber daya alam, penguatan layanan dasar, dan reformasi birokrasi. Meskipun demikian, tingginya pertumbuhan kredit pada sektor-sektor ini perlu disertai manajemen risiko yang cermat, mengingat potensi fluktuasi dan ketidakpastian yang masih menyertai proses transformasi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembiayaan yang berimbang antara sektor-sektor besar yang mapan dan sektor-sektor bertumbuh perlu terus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan kredit yang sehat dan inklusif.

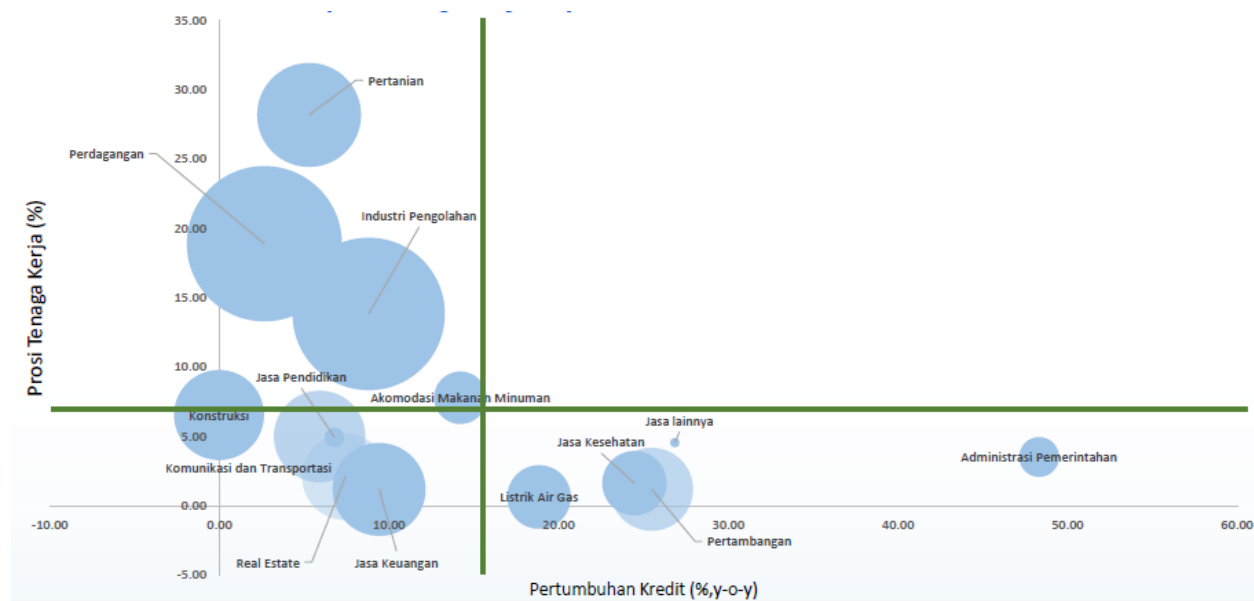
Gambar 3.4 Porsi PDB serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)

Keterangan: Ukuran bubble = porsi kredit sektor tersebut terhadap total kredit (%)

Sumber: OJK dan CEIC (2025)

Dari sisi porsi tenaga kerja, hingga kuartal I-2025, sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, masing-masing dengan porsi di atas 20% terhadap total tenaga kerja nasional. Namun, kedua sektor ini menunjukkan pertumbuhan kredit yang relatif moderat dibandingkan sektor lain. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan ekonomi riil, penyaluran kredit ke sektor ini belum mencerminkan peran strategisnya. Hal ini menegaskan bahwa tantangan struktural seperti fluktuasi harga komoditas, risiko cuaca di sektor pertanian, serta tekanan biaya dan persaingan global di sektor manufaktur masih menjadi penghambat ekspansi pembiayaan.

Sebaliknya, sejumlah sektor dengan pangsa tenaga kerja yang rendah seperti pertambangan dan administrasi pemerintahan justru mencatatkan pertumbuhan kredit yang tinggi. Ini mencerminkan arah kebijakan dan investasi yang semakin fokus pada sektor-sektor strategis, termasuk hilirisasi SDA dan digitalisasi layanan publik. Sektor listrik, gas, dan air serta jasa kesehatan, meskipun belum dominan dari sisi ketenagakerjaan, juga menunjukkan peningkatan pembiayaan sebagai respons atas kebutuhan modernisasi infrastruktur dan layanan dasar. Fenomena ini menandai transformasi struktur ekonomi yang mulai bergeser dari padat karya menuju padat modal dan berbasis teknologi.

Gambar 3.5 Porsi Tenaga Kerja Serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)

Keterangan: Ukuran bubble = porsi kredit sektor tersebut terhadap total kredit (%)
Sumber: OJK dan CEIC (2025)

Ke depan, penting bagi lembaga keuangan dan pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit ke sektor-sektor strategis dan penguatan inklusi pembiayaan pada sektor padat karya. Meningkatkan akses dan efisiensi kredit di sektor pertanian dan manufaktur tidak hanya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan. Dengan strategi yang lebih terarah, perbankan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendukung agenda pembangunan inklusif yang tidak meninggalkan sektor-sektor esensial dalam struktur ekonomi nasional.

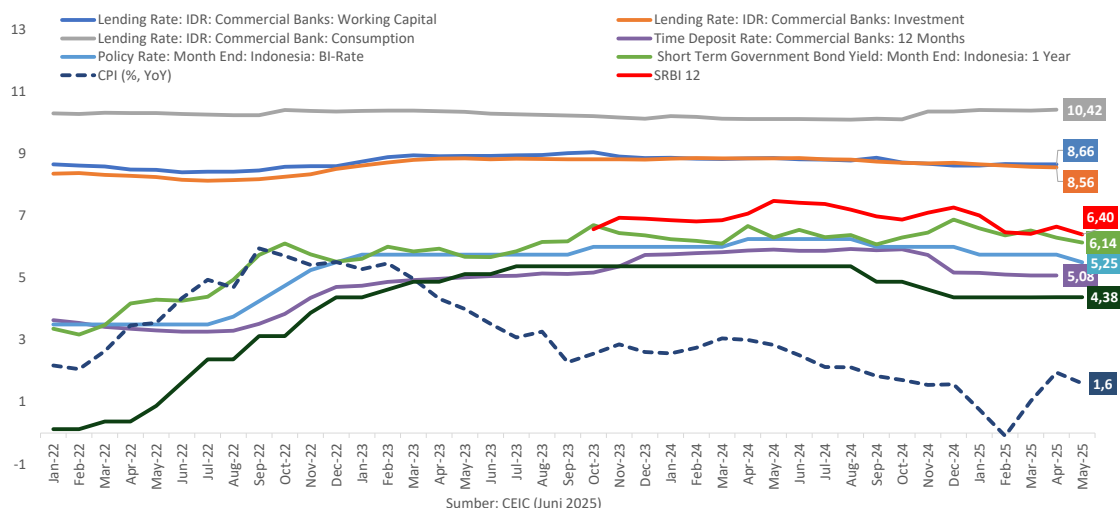
3.2 Perkembangan Suku Bunga

Pada Juli 2025, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga kebijakan (BI Rate) menjadi 5,25%, lending facility menjadi 6%, dan deposit facility menjadi 4,5%. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tren inflasi yang terus menurun dan berada di level historis terendah, yakni hanya 1,87% (yoy) pada Juni 2025. Penurunan suku bunga ini menjadi sinyal pelonggaran moneter yang lebih akomodatif guna mendorong aktivitas ekonomi, di tengah perlambatan permintaan domestik dan konsumsi masyarakat.

Meskipun BI Rate telah diturunkan, transmisi kebijakan moneter ke pasar belum sepenuhnya optimal. Tingkat suku bunga kredit perbankan—baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi—masih bertahan di level tinggi. Hingga April 2025, suku bunga kredit modal kerja tercatat sebesar **8,66%**, kredit investasi sebesar 8,56%, dan

kredit konsumsi bahkan mencapai 10,42%. Hal ini menciptakan jarak yang semakin lebar antara inflasi aktual dan cost of borrowing di sektor riil, sehingga berpotensi menahan ekspansi dunia usaha.

Gambar 3.6 Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Indonesia



Sumber: CEIC (2025)

Di sisi lain, suku bunga simpanan (deposito) 12 bulan cenderung stagnan di kisaran 5,08%, lebih tinggi dari tingkat inflasi, namun belum cukup menarik minat dana jangka panjang secara luas. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara jangka pendek (1 tahun) berada di level 6,14%, dan instrumen SRBI-12 sebesar 6,40%, menjadikannya alternatif menarik bagi pelaku pasar dan investor institusional. Kesenjangan imbal hasil ini memperlihatkan bahwa instrumen pasar uang pemerintah menjadi pilihan utama likuiditas, sementara sektor perbankan masih menghadapi tantangan dalam kompetisi dana.

Tren ini juga memperlihatkan bahwa meskipun suku bunga kebijakan menurun, struktur suku bunga perbankan tetap kaku (*sticky downward*). Hal ini bisa disebabkan oleh masih tingginya biaya dana (*cost of fund*), persepsi risiko kredit yang belum membaik, serta struktur biaya operasional yang belum efisien. Perbankan tampak masih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga kredit, meskipun tekanan inflasi telah mereda.

Ke depan, efektivitas pelonggaran moneter akan sangat bergantung pada kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan insentif suku bunga ke dunia usaha dan rumah tangga. Bank Indonesia perlu terus memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui koordinasi dengan sektor perbankan dan instrumen makroprudensial yang tepat. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pelonggaran suku bunga benar-benar berdampak terhadap penguatan permintaan domestik dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Outlook 2025

4. OUTLOOK 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,6% hingga 5,0%, relatif moderat di tengah tekanan global yang masih tinggi. Ketidakpastian arah suku bunga global, fluktuasi harga komoditas, serta tensi geopolitik menjadi faktor eksternal utama yang dapat membatasi ruang pertumbuhan. Di tingkat domestik, konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi penopang, namun dibayangi oleh kecenderungan kehati-hatian pelaku usaha dan terbatasnya ekspansi sektor swasta.

Inflasi diperkirakan tetap rendah di dibawah 2%, mencerminkan lemahnya tekanan permintaan serta dampak dari penurunan harga pangan dan barang yang diatur pemerintah. Meskipun memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter, inflasi yang terlalu rendah juga perlu dicermati sebagai sinyal turunnya daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada dalam rentang Rp16.000 – Rp16.700/USD, dengan stabilitas yang masih tergantung pada kondisi eksternal, terutama kebijakan bank sentral AS dan aliran modal portofolio.

Pertumbuhan kredit diproyeksikan berada di kisaran 8,7%. Secara umum, perbankan masih menerapkan pendekatan yang selektif dalam menyalurkan kredit, terutama di sektor-sektor yang berisiko tinggi atau belum menunjukkan peningkatan permintaan. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan hanya mencapai 4% hingga 6%, yang mencerminkan tantangan dalam penghimpunan likuiditas di tengah tren suku bunga yang mulai melandai.

Tabel 4.1 Proyeksi Indikator Ekonomi 2025

Indikator	Perbanas	Mandiri	BCA	BRI	BSI	Maybank	UOB	Permata	BI
Pertumbuhan Ekonomi	4,8% ± 0,1%	4,88%	4.80%	4,65% - 4,93%	5%	4,8%	5%	4,75%	4,6% - 5,4%
Inflasi	1,9% ± 0,5%	2.38%	2.1%	1,79% - 2,07%	2,68%	2,11%	2,40%	2,33%	2,5% ± 1%
Nilai Tukar (Rp/USD) (End of Period)	16.300 - 16.700	16.484	16.943	16.011 - 16.456	16.391	16.297	16.500	16.295	16.000 - 16.500
Pertumbuhan Kredit (End of Period)	8,7% ± 1,0%	10,47%	-	8,43% - 9,36%	9,06%	8%	-	8,88%	8% - 11%
Pertumbuhan Deposit (End of Period)	4,38% ± 1%	6,13%	-	4,80% - 5,68%	5,88%	5,85%	-	-	-

Sektor Pertambangan dan Penggalan diperkirakan masih menjadi motor utama pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2025. Setelah mencatat pertumbuhan kuat sebesar 29,8% (yoy) pada kuartal I 2025, sektor ini diproyeksikan tumbuh sebesar 23,4% (yoy) pada akhir tahun. Kinerja ini mencerminkan konsistensi ekspansi di sektor mineral dan hilirisasi sumber daya alam yang menjadi prioritas kebijakan nasional. Di sisi lain, sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 19,4% (yoy) pada awal tahun, meskipun diperkirakan melandai menjadi hanya 2,6% (yoy) di akhir 2025, mengindikasikan adanya normalisasi setelah lonjakan investasi logistik di tahun-tahun sebelumnya.

Sektor Pengadaan Listrik, Gas, dan Air juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 16,7% (yoy) pada kuartal I 2025 dan diproyeksikan sedikit melambat menjadi 14,9% (yoy) di akhir tahun. Sektor ini tetap mendapat dorongan dari pembangunan infrastruktur energi dan proyek transisi energi yang tengah berlangsung. Sementara itu, sektor Informasi dan Komunikasi diperkirakan akan tumbuh sekitar 10% (yoy), seiring dengan meningkatnya

kebutuhan digitalisasi dan investasi di sektor data center serta jaringan. Kredit di sektor Jasa Keuangan dan Asuransi juga diprediksi tumbuh stabil di kisaran 12% (yoy), mencerminkan peran strategis sektor ini dalam distribusi pembiayaan dan pembentukan pasar keuangan nasional.

Tabel 4.2 Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025

Sektor	2022	2023	2024	2025-Q1	2025F
Pertambangan & Penggalian	51,3%	25,0%	32,2%	33%	23,4%
Jasa Keuangan & Asuransi	35,3%	20,4%	25,1%	23,6%	12,4%
Transportasi & Pergudangan	5,9%	26,0	26,6	23,3	20,6%
Informasi & Komunikasi	10,8%	7,6%	8,7%	10,1%	10,4%
Pengadaan Listrik, Gas, & Air	1,2%	13,4%	24,3%	22,6%	14,9%
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	7,4%	9,1%	8,8%	8,9%	4,2%
Industri Pengolahan	12,5%	4,7%	5,1%	5,2%	7,7%
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,4%	8,5%	7,6%	8,2%	5,6%
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,0%	5,8%	6,4%	6,7%	3,9%
Konstruksi	4,3%	-0,4%	0,9%	-1,2%	1%
Total Kredit	11,3%	10,3%	10,4%	9,1%	8,7%

*) F=Forecast

Sumber Data: Bank Indonesia, Proyeksi oleh OCE PERBANAS

Namun, sektor-sektor utama kredit seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar & Eceran menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat. Kredit ke sektor industri pengolahan tumbuh 8,4% (yoy) pada kuartal I dan diproyeksikan hanya mencapai 7,7% (yoy) pada akhir 2025. Ini menunjukkan adanya perlambatan ekspansi manufaktur, seiring tantangan global seperti tekanan biaya produksi dan permintaan ekspor yang melandai. Sektor perdagangan bahkan hanya tumbuh 0,3% (yoy) pada kuartal I, dan

diperkirakan tumbuh 4,2% (yoy) sepanjang tahun. Kinerja ini dapat mencerminkan lemahnya konsumsi rumah tangga dan kehati-hatian dalam pembiayaan sektor ritel.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diprediksi mencatat pertumbuhan kredit sebesar 5,6% (yoy) pada 2025, relatif stabil sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan dan pembiayaan pupuk serta alat produksi. Sementara itu, kredit untuk sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan tumbuh 3,9% (yoy), mengindikasikan bahwa setelah mencapai level yang relatif optimal, ruang pertumbuhan lanjutan cenderung lebih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya penyesuaian strategi perbankan agar lebih selektif, dengan menyeimbangkan dukungan terhadap sektor prioritas dan kehati-hatian pada sektor yang masih melambat atau belum pulih sepenuhnya.



Griya Perbanas, Lt. 1
Jln. Perbanas Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940

P. 62 21 5223038, 62 21 5255731
F. 62 21 5223037, 5223339

E-mail : sekretariat@perbanas.org